

**TATA KELOLA *BLUE ECONOMY* DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA KELAUTAN (STUDI KASUS PROGRAM 1000
RUMPON DI KABUPATEN BULUKUMBA)**

ANDI MUH.ISRA

Nomor Stambuk : 105641108521



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

**TATA KELOLA BLUE ECONOMY DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA KELAUTAN (STUDI KASUS PROGRAM 1000
RUMPON DI KABUPATEN BULUKUMBA)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diusulkan Oleh

Andi Muh. Isra

Nomor Stambuk Mahasiswa : 10564110851

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

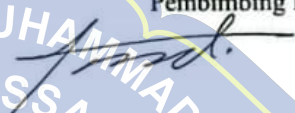
Judul Skripsi : Tata Kelola Blue Economy Dalam Pengelolaan
Sumber Daya Kelutan Studi Kasus Program 1000
Rumpon Di Kabupaten Bulukumba
Nama Mahasiswa : Andi Muh.Isra
Nomor Induk Mahasiswa : 105641108521
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I


Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Pembimbing II


Muhammad Amril P Putra, S.IP., M.AP

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM. 992 729

Ketua Prodi
Ilmu Pemerintahan


Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

NBM. 984 810

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0404/FSP / A.4-11/IV/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari sabtu tanggal 16 bulan Agustus tahun 2025.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM.992797

Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM.1067463

Tim Penguji:

1. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
2. Nur Khaerah, S.IP., M.I.P
3. Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Mahasiswa : Andi Muh.Isra

Nomor stambuk Mahasiswa 105641108521

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar 16 Agustus 2025
Yang menyatakan

Andi Muh. Isra

ABSTRAK

ANDI MUH ISRA. Tata Kelola *Blue economy* Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Studi Kasus Program 1000 rumpon Di Kabupaten Bulukumba (dibimbing oleh Nur Khaerah dan Muhammad Amril Pratama Putra)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola blue economy dalam pengelolaan sumber daya kelautan melalui studi kasus Program 1000 Rumpon di Kabupaten Bulukumba. Program ini merupakan inisiatif strategis yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan *good governance* berdasarkan indikator yang dirumuskan oleh UNDP (1997), meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, penegakan hukum, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan visi strategis.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam program 1000 rumpon telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan hasil tangkapan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Aspek transparansi dan partisipasi teridentifikasi cukup kuat dalam pelaksanaan program, sementara penegakan hukum dan regulasi teknis masih membutuhkan penguatan. Responsivitas pemerintah daerah dalam menjawab dinamika di lapangan menjadi faktor kunci dalam efektivitas program. Secara keseluruhan, program ini mencerminkan pendekatan *blue economy* yang mengintegrasikan efisiensi sumber daya alam, keberlanjutan ekosistem, dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir secara terpadu.

Kata kunci ; *Good Governance* , *Blue economy*, Program 1000 Rumpon

ABSTRACT

ANDI MUH ISRA. *Blue economy Governance in Marine Resource Management: A Case Study of the 1,000 Fish Aggregating Devices (FADs) Program in Bulukumba Regency (supervised by Nur Khaerah and Muhammad Amril Pratama Putra)*

This study aims to examine blue economy governance in marine resource management through a case study of the 1000 Rumpon Programme in Bulukumba Regency. This programme is a strategic initiative implemented by the local government as an effort to increase fisher productivity while maintaining the sustainability of marine ecosystems. In its analysis, this study uses a good governance approach based on indicators formulated by the UNDP (1997), including transparency, accountability, participation, equity, law enforcement, effectiveness, efficiency, responsiveness, and strategic vision.

The method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation, then analysed using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques.

The results of the study indicate that the application of good governance principles in the 1000 rumpon programme has contributed to increased catch yields and strengthened the economy of coastal communities. Transparency and participation were identified as strong aspects of programme implementation, while law enforcement and technical regulations still require strengthening. The responsiveness of local governments in responding to dynamics in the field was a key factor in the programme's effectiveness. Overall, this programme reflects a blue economy approach that integrates natural resource efficiency, ecosystem sustainability, and the socio-economic empowerment of coastal communities in an integrated manner.

Keywords: Good Governance, Blue Economy, 1000 Fish Aggregating Devices Program

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, Atas segala Rahmat, karunia, dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis.

Setiap nafas dan detak jantung adalah anugerah dari-Nya. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan Salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya telah dan sepanjang masa dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, juga kepada keluarga, para sahabat dan segenap umat yang tetap istiqamah di atas ajaran Islam hingga akhir zaman.

Penelitian ini berjudul “: Tata Kelola *Blue economy* Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Studi Kasus Program 1000 rumpon Di Kabupaten Bulukumba ” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini, peneliti menghadapi berbagai tantangann dan kendala yang tidak mudah. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan do’a dan dukungan kepada yang hormat:

1. Untuk orangtua penulis Etta Andi ABD. Kahar dan ibu Andi Irma, terima kasih atas. Doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moril dan materil yang mereka berikan menjadi fondasi utama dalam perjalanan ini. Tanpa cinta, kesabaran, dan pengorbanan mereka,

pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih atas segala perjuangan dan doa yang selalu menyertai

2. Ayahanda Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, MT, IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Nur Khaera, S.IP., M.IP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan.
5. Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku Pembimbing I dan Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP selaku Pembimbing II yang telah menuntun peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan serta para staff yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan. .
7. Seluruh keluarga penulis yang sudah membantu dan mendukung penulis selama menempuh studi.
8. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seseorang yang senantiasa hadir dan mengawal setiap proses dalam penyelesaian studi ini. Perannya menjadikan bagian penting yang tak terpisahkan dari selesainya karya ini.

9. Teman- teman IP C 21, keluarga besar HIMJIP, yang bersedia memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan skripsi.
10. Teruntuk sahabat- sahabat yang selalu jaya bersama peneliti yang telah menjadi saudara dan teman seperjuangan selama berada di perantauan dan senantiasa mendukung serta memberikan bantuan disegala situasi. Terima kasih atas persaudaraannya hingga saat ini. Alhamdulillah semuanya dapat dilalui dengan baik.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan penelitian ini. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak. Aamiin Ya Robbal'Alamin.

Makassar, 16 Agustus 2025

Andi Muh Isra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Literature Review	7
B. Tinjauan Teori dan Konsep.....	14
1. Governance.....	14
2. Blue economy.....	21
3. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	24
4. Program Rumpon	25
C. Kerangkar Pikir	28
D. Fokus Penelitian.....	29
E. Deskripsi Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Informan Penelitian	34
F. Teknik Analisis Data	35

G. Teknik Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba	39
2. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba	40
3. Deskripsi Program Rumpon Di Kabupaten Bulukumba	43
B. Hasil Penelitian Tentang Tata Kelola Blue Economy Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Studi Kasus Program 1000 Rumpon Di Kabupaten Bulukumba	44
1. Governance.....	45
C. Pembahasan Tentang Tata Kelola Blue economy Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Studi Kasus Program 1000 rumpon Di Kabupaten Bulukumba.....	73
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Klasterisasi Olahan VOSviewer.....	9
Tabel 3 1 Informan Penelitian	35
Tabel 4 1 Jumlah Disribusi Rumpon.....	44
Tabel 4 2 Data Hasil Tangkapan Rumpon	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Vizualisasi hasil olahan VOSviewer	8
Gambar 2 2 Rumpon	28
Gambar 2 3 Kerangka pikir	29
Gambar 4 1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba.....	42
Gambar 4 2 Platform Digital Dinas Perikanan Kab.Bulukumba.....	48
Gambar 4 3 Sosialisasi Dan Bimbingan Program Rumpon.....	55
Gambar 4 4 Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Rumpon	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya laut merupakan salah satu cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan sumber daya laut juga memiliki tujuan, yakni sebuah proses dan tujuan. Sebuah proses, pengelolaan memiliki makna serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lemah dan sebagai bentuk kecintaan kita terhadap hasil laut. Sedangkan sebagai tujuan dapat dijadikan sebagai indikator sebagai keberhasilan pengembangan sebagai sebuah proses. Pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan, maka harus ada penyamaan dan penyatuan orientasi pembangunan Ekonomi basis maritim. Orientasi ini harus menjadi visi dari pembangunan secara nasional yang dilaksanakan oleh segenap warga negara Indonesia. Tujuan dari orientasi ini adalah membuat visi bersama untuk memanfaatkan ekosistem perairan secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia (Hakim, 2013).

Tata kelola (*governance*) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu *civil society* (Sumantri, 2022). Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan

seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai *good governance* dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip-prinsip *governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dalam masyarakat dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar. Dalam prakteknya pemerintah yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan juga bertanggung jawab. Untuk mencapai *good governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan (Maryam, 2016)

Blue economy merupakan konsep optimalisasi sumber daya laut yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan (Ilma, 2014). Konsep *Blue economy* mengedepankan dan menitikberatkan pada efisiensi. Efisiensi mendorong adanya pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari. Inti utama dari *Blue economy* ini adalah kegiatan yang pro ekosistem. Segala limbah keluaran dari kegiatan perikanan harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari tanah maupun perairan umum.

Konsep *Blue economy* telah dikembangkan sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh sistem ekonomi global yang seringkali bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan alam. Di tengah permasalahan ini, diperlukan

adanya suatu paradigma ekonomi baru yang mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan merujuk kepada prinsip-prinsip ekosistem alam. Penekanan konsep ini diperlukan sebagai tanggapan atas tantangan bahwa sistem ekonomi global saat ini seringkali bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan akibat praktek keserakahan manusia (Adnan et al., 2023).

Blue economy dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika sumber daya suatu negara dipetakan dan diintegrasikan dengan baik dalam kerangka kelembagaan yang kuat dan berdasarkan kebijakan dan penelitian yang konkret (Nasution, 2022). Penerapan konsep *Blue economy* yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut menjadi hal yang sangat relevan, tetapi sering kali menghadapi hambatan dalam implementasinya. *Blue economy* menuntut adanya perubahan paradigma dari eksploitasi sumber daya laut yang tak terkendali menjadi pengelolaan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan.

Salah satu inisiatif yang diterapkan untuk mengoptimalkan potensi ini adalah bantuan program 1000 rumpon menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah berinisiatif memberikan bantuan program rumpon kepada kelompok nelayan terkhusus di beberapa kecamatan di Bulukumba yang menerima bantuan. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kelestarian sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Pada prinsipnya rumpon adalah suatu alat bantu pengumpul ikan yang

fungsi utamanya menarik perhatian ikan-ikan supaya berkumpul di sekitarnya dalam waktu tertentu, sehingga nelayan mempunyai arah/tujuan dalam mengoperasikan alat tangkapnya dengan kata lain *Fishing Ground* yang dituju sudah pasti yaitu ke arah rumpon miliknya (SHIDDIQ, 2018).

Program rumpon di Kabupaten Bulukumba memiliki potensi besar untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut dampak yang terjadi ketika pengelolaanya tidak efektif. Berkurangnya kelimpahan ikan. Penggunaan rumpon secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya penangkapan ikan dalam jumlah besar yang dapat menyebabkan berkurangnya kelimpahan ikan berupa terjadinya lebih tangkap (*over fishing*) dan hilangnya kemampuan pemulihan stok ikan karena tertangkapnya ikan yang masih kecil dan ikan yang belum memijah dalam jumlah besar (Burhanuddin & Nessa, 2018).

Jumlah Penyaluran program rumpon di Bulukumba mulai dari 2021- 2024 sebanyak 687 unit maka ini pemerintah daerah terus mengupayakan penyaluran agar visi dari bantuan program rumpon ini bisa efektif dan memastikan program rumpon ini betul- betul berdampak pada peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan nelayan, maka pihak dari Dinas Perikanan melaksanakan survey bagaimana dampak ekonomi dan ekologi kepada kelompok penerima bantuan rumpon. Namun untuk lebih menjamin program ini berjalan sesuai maka diperlukanya regulasi yang mengatur jelas tentang pemanfaat dan penggunaan rumpon secara detail. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengetahui bagaimana

bantuan program rumpon ini diterapkan terhadap kesejahteraan masyarakat dan tetap memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan yang terintegrasi dan menjawab bagaimana program rumpon di Kabupaten Bulukumba yang memiliki potensi besar untuk menjadi model implementasi *Blue economy*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Tata kelola *Blue Economy* Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Studi Kasus Program Rumpon Di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tata kelola *Blue economy* dalam pengelolaan sumber daya kelautan studi kasus : program rumpon di Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep *blue economy*, khususnya dalam konteks tata kelola sumber daya kelautan. Dengan menelaah implementasi program rumpon di Kabupaten Bulukumba, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pendekatan berbasis keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap. Dengan menganalisis konsep penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademis bagi studi-studi selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut

berbasis *Blue economy* dan dampaknya terhadap keseimbangan ekologi

2. Manfaat Praktis : Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada prinsip *blue economy*. Kebijakan tersebut mencakup regulasi terkait penempatan dan pengelolaan rumpon, pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan, serta pengintegrasian keberlanjutan ekologi dalam kebijakan perikanan daerah. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat nelayan mengenai pentingnya pengelolaan rumpon yang berbasis keberlanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literature Review

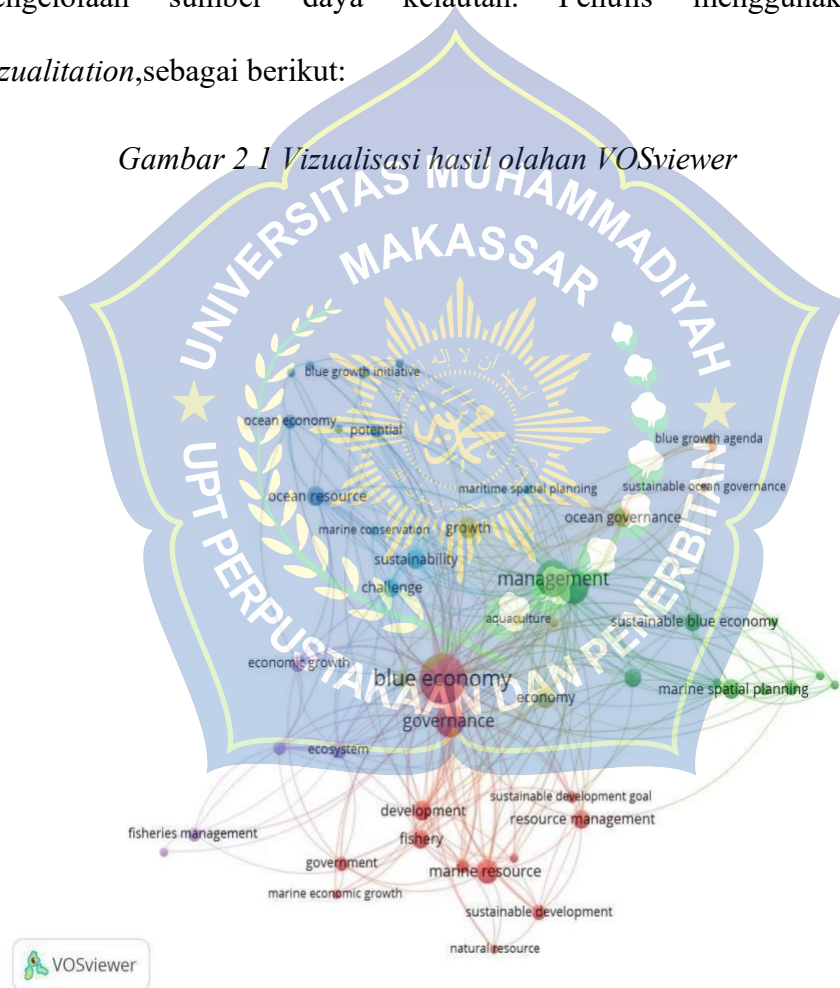
Tinjauan pustaka memiliki peran penting dalam mendukung dan memastikan adanya kebaruan dalam suatu karya ilmiah. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sejumlah referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan sesuai dengan ruang lingkup kajian. Tujuannya adalah untuk membandingkan informasi yang ditemukan, melengkapi analisis, serta mengidentifikasi aspek kebaruan dari penelitian ini. Untuk mendukung proses tersebut, penulis memanfaatkan perangkat lunak VOSviewer yang digunakan pada laptop untuk memvisualisasikan dan memastikan hubungan pola dari penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian sebelumnya menjadi landasan penting dalam memastikan relevansi dan kebaruan dari penulisan ilmiah. Dalam pengumpulan referensi, penulis menggunakan perangkat lunak *Publish or Perish* untuk menemukan karya-karya ilmiah yang relevan sesuai dengan topik penelitian. Semua referensi yang ditemukan disimpan dalam format RIS manager. Data dalam format ini kemudian diproses menggunakan *VOSviewer* untuk menghasilkan visualisasi yang mempermudah analisis. Proses ini mencakup seleksi kata-kata kunci yang signifikan dan penghilangan istilah yang kurang relevan untuk menjaga fokus penulisan. Sebanyak 200 artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2019 hingga 2024 digunakan sebagai bahan kajian. Artikel-artikel ini diperoleh dengan menggunakan kata kunci seperti *governance*, *blue economy*, *ocean resources*

melalui aplikasi *Publish or Perish*.

Penelitian ini bertujuan menemukan celah penelitian yang relevan untuk mendukung kebaruan dalam karya ilmiah ini, maka dari proses ini, diharapkan dapat diperoleh gambar yang sesuai mengenai penelitian ini dan menghubungkan konsep - konsep yang relevan dalam konteks tata kelola *blue economy* dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Penulis menggunakan *network vizualitation*, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Vizualisasi hasil olahan VOSviewer



Berdasarkan Hasil analisis penelitian terdahulu yang diolah menggunakan perangkat lunak *VOSviewer* dengan kata kunci *governance*, *blue economy*, *ocean resources* program menunjukkan beberapa tema yang paling sering muncul. Tema-tema utama yang muncul adalah *blue economy*. Dalam konteks ini, artikel-artikel

tersebut membentuk landasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi *blue economy*. Temuan ini mengindikasikan bahwa penelitian di bidang ekonomi biru dan pengelolaan sumber daya kelautan memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep keberlanjutan dalam berbagai aspek, baik ekologi, sosial, maupun ekonomi

Tabel 2 1 Klasterisasi Olahan *VOSviewer*

No	Klaster	Kata kunci
1.	Klaster 1	<i>Blue economy, development, fishery, governance, government, livelihood, marine economic growth, marine resource, natural resource, ocean health, resource management, sustainable development, sustainable development goal.</i>
2.	Klaster 2	<i>Adaptive management, blue growth, management, marine governance, marine management, marine maritime spatial planning, marine spatial planning, opportunity, public perception, social sustainable management, sustainable ocean economy.</i>
3	Klaster 3	<i>Blue growth initiative, coastal tourism, integrated ocean management, ocean economy, ocean resource, potential, sustainable management, sustainable ocean economy</i>
4	Klaster 4	<i>Aquaculture, economy, growth, impact, sustainable ocean management.</i>
5	Klaster 5	<i>Economic growth, ecosystem, fisheries management, recovery, sustainable use.</i>
6	Klaster 6	<i>Challenge, marine conservation, maritime spatial planning, sustainability</i>

7	Klaster 7	<i>Blue growth agenda, implementation, ocean governance, sustainable ocean governance.</i>
---	-----------	--

Analisis bibliometrik yang dihasilkan menggunakan *VOSviewer* yang menunjukkan peta hubungan antar tema yang muncul dalam penelitian terkait Blue economy. Dalam visualisasi ini, setiap titik merepresentasikan kata kunci yang sering muncul dalam penelitian, dengan ukuran titik menunjukkan frekuensi kemunculan kata tersebut. Kata kunci "*blue economy*" memiliki ukuran terbesar, menandakan bahwa konsep ini menjadi pusat dalam diskusi ilmiah. Selain itu warna yang berbeda pada peta ini menunjukkan kelompok (klaster) kata kunci yang memiliki keterkaitan tematik.

Terdapat tujuh klaster utama yang teridentifikasi dalam analisis ini. Klaster pertama ditandai dengan warna merah, yang berfokus pada aspek tata kelola dan pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi biru. Kata kunci dalam klaster ini mencakup "*governance*" (tata kelola), "*marine resource*" (sumber daya laut), "*sustainable development*" (pembangunan berkelanjutan), serta. Klaster ini menunjukkan pentingnya regulasi dan kebijakan dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Dalam upaya menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya laut, peran kebijakan pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Kebijakan yang tepat dan efektif diperlukan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, melindungi ekosistem laut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber

daya laut (Sultan & Ramadhan, 2024). Klaster kedua, yang berwarna hijau, berkaitan dengan aspek pengelolaan dan perencanaan tata ruang laut. Kata kunci utama dalam klaster ini meliputi *"management"* (pengelolaan) dan *"sustainable blue economy"* (ekonomi biru berkelanjutan). Pengelolaan sumberdaya laut pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan strategi manajemen yang baik berperan penting dalam memastikan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya laut (Rifai & Haeril, 2024).

Klaster ketiga, oleh warna biru, berfokus pada suatu sistem manajemen laut yang terintegrasi. Kata kunci seperti *"blue growth initiative"* (iniasiatif pertumbuhan biru), *"coastal tourism"* (pariwisata pesisir), dan *"integrated ocean management"* (pengelolaan laut terpadu) yang mengutamakan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Melalui pengelolaan yang cermat, potensi besar ekonomi laut dapat dimanfaatkan tanpa merusak ekosistem pesisir, yang pada gilirannya mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Hariadi et al., 2023).

Klaster keempat, yang berwarna kuning. Kata kunci dalam klaster ini termasuk *"aquaculture"* (akuakulture), dan *"sustainable ocean management"* (pengelolaan laut berkelanjutan). Tujuan utama dari praktik akuakultur adalah untuk meningkatkan produksi hasil perikanan dengan cara yang ramah lingkungan

juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Fokus utama klaster ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola laut yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sektor *aquaculture* atau budidaya perikanan dapat terus berkembang tanpa merusak sumber daya alam yang ada.

Klaster kelima, dengan warna ungu, berfokus pada tata kelola laut dan agenda pertumbuhan biru. Kata kunci utama dalam klaster ini meliputi "*fisheries management*" (pengelolaan perikanan) dan "*recovery ecosystem*" (pemulihan ekosistem). Klaster ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekosistem dan keberlanjutan dalam pemanfaatan perikanan menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip konservasi dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana terhadap ekosistem perikanan sangat penting untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Klaster keenam, yang berwarna biru muda dengan Kata kunci dalam klaster ini meliputi "*marine conservation*" (konservasi laut) dan "*maritime spatial planning*" (perencanaan tata ruang maritim). Klaster ini menunjukkan bahwa Konservasi laut menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman terhadap biodiversitas laut yang terus berkembang. Untuk itu, klaster ini berperan krusial dalam mendukung pengelolaan yang berkelanjutan dengan mengatur zonasi dan penggunaan ruang laut secara optimal. Dengan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan, perencanaan ini berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya laut.

Klaster ketujuh, yang berwarna coklat dengan Kata kunci utama dalam klaster ini termasuk "*implementation*" (implementasi) dan "*sustainable ocean governance*" (tata kelola laut berkelanjutan). Klaster ini menggarisbawahi pentingnya Implementasi dari berbagai langkah strategis yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan ekosistem laut. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tujuan ini adalah penerapan tata kelola laut yang tidak efektif. *Ocean governance* yang baik menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut mendukung keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *sustainable ocean governance* sangat diperlukan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas yang berhubungan dengan laut, serta menjamin manfaat yang adil dan merata bagi semua pihak (Dina Sunyowati, 2010)

Berdasarkan hasil analisis visualisasi data menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*, penelitian mengenai tata kelola ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya kelautan, khususnya melalui program rumpon di Kabupaten Bulukumba, menunjukkan keberadaan klaster 1 tentang *blue economy* adalah menjadi inti dari jaringan bibliometrik, yang menunjukkan bahwa istilah ini adalah tema utama penelitian atau topik yang paling sering dibahas. Masing-masing klaster memberikan pemahaman mendalam mengenai elemen-elemen yang relevan dalam mendukung keberlanjutan program ini. Secara keseluruhan analisis terhadap klaster-klaster ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya kelautan dan implementasi ekonomi biru memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Pengelolaan yang efektif tidak hanya bergantung

pada penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan penguatan kapasitas kelembagaan, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Prinsip keberlanjutan ekologis, ekonomi, dan sosial harus menjadi landasan dalam setiap upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor kelautan.

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. *Governance*

Governance ialah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan konsep *good governance* maka diperlukan sinergi antar tiga aktor utama, yakni pemerintah, *privat sector*, dan *civil society*. Ketiga aktor ini mempunyai peran dalam mengelola sumber daya, lingkungan social, ekonomi, dan budaya (Handayani & Nur, 2019). Makna dasar dari *governance* lazimnya digunakan dalam agenda setting proses kebijakan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Dalam amatan administrasi negara sebenarnya *governance* bukan konsep baru dalam ruang lingkup pemerintahan. *Governance* memberikan pikiran baru dalam formulasi kebijakan dan cara bagaimana kebijakan di tetapkan bisa diterapkan dengan tepat sasaran.

Berdasarkan definisi *governance* menurut *United Nations Development Programme*, dapat diketahui bahwa *governance* memiliki tiga kaki (*tree legs*), yaitu politik, ekonomi, dan administrasi. Politik mengacu pada proses pembuatan keputusan kebijakan (*policy/strategy formulation*), luasnya kewenangan dan legitimasi yang didapat dari proses politik yang demokratis, ekonomi mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang

berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, administrasi mengacu pada sistem implementasi kebijakan. pelayanan publik yang efisien dan akuntabel oleh pemerintah yang kompeten dalam mendesain dan mengimplementasikan program, serta pengelolaan kepentingan publik.

Konsep ini berkembang dari pendekatan tradisional yang bersifat hierarkis menjadi pendekatan yang lebih horizontal dan partisipatif. Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, *governance* menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, komunitas nelayan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan. Prinsip *good governance* digunakan dalam memahami mengapa suatu pemerintahan dapat dikatakan berhasil, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di dasarkan pada sejumlah prinsip utama berikut:

a. Tranparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan dimana negara memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada lembaga yang membutuhkannya. Asosiasi wajib memberikan informasi dan data lainnya dan Stakeholder gunakan untuk membuat keputusan (Sari et al., 2022).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban organisasi yang bergerak dibidang publik kepada penikmat layanan organisasi publik tersebut, yang dimaksud dengan organisasi publik disini merujuk pada pemerintah yang bergerak pada sektor publik, hal tersebut berarti akuntabilitas publik adalah kemampuan dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan atau kebijakan mereka terhadap publik atau masyarakat selaku penikmat layanan publik (Maolani et al., 2023).

Segala sesuatu yang menjadi langkah pemerintah, baik dalam pelayanan, kebijakan, dan kerjasama tentunya harus sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku yang telah ditetapkan sebelumnya, bentuk dari langkah pemerintah ini perlu dipertanggungjawabkan dengan jelas, tepat, efektif dan teratur. Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah selaku pemangku amanat rakyat dalam pelaksanaan atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat selaku penikmat layanan

c. Partisipasi

Partisipasi adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini

dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Keterlibatan masyarakat memiliki peranan yang urgent untuk mencapai keberhasilan ataupun kegagalan dalam tata kelola publik di Indonesia. Terlebih Indonesia menganut bentuk pemerintahan demokrasi, dimana seluruh warga negara mempunyai hak yang sama untuk ikut secara langsung ataupun tidak langsung dalam mengambil bagian terkait keputusan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bernegara. Partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan *public governance*. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya (Jayanti, 2023).

d. Kesetaraan

Kesetaraan (*equity*) merupakan salah satu indikator penting dalam prinsip *good governance* yang ditekankan oleh UNDP. Kesetaraan berhubungan dengan pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh pihak, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, politik, maupun kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya publik. Seluruh warga memiliki kesempatan yang sama dimata hukum dan untuk mencapai kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan akan memacu dampak keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya

intervensi dari pihak manapun (Nurhidayat, 2023).

e. Efektivitas

Efektivitas merupakan indikator dalam teori *good Governance* menurut UNDP yang mengacu pada sejauh mana tujuan program dan kebijakan publik dapat dicapai secara optimal dan terukur (Rostiawati, 2020). Efektivitas tidak semata-mata dipahami sebagai terpenuhinya target administratif, tetapi juga dilihat dari keberhasilan program dalam memberikan manfaat konkret bagi masyarakat sasaran secara berkelanjutan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya publik secara tepat sasaran sehingga menghasilkan keluaran yang memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, dalam kerangka pembangunan *blue economy*, indikator efektivitas juga berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan bertanggung jawab, peningkatan produktivitas masyarakat pesisir, serta perlindungan ekosistem laut guna menjamin keberlanjutan sumber daya di masa mendatang. Dengan demikian, efektivitas menjadi ukuran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi *good governance* karena hanya melalui tercapainya tujuan yang berdampak nyata, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan secara utuh.

f. Efisiensi

Efisiensi menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya dengan biaya serendah mungkin. Efisiensi tidak hanya berarti penghematan anggaran, tetapi juga memastikan penggunaan dana publik tepat sasaran dan dapat memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks tata kelola sektor kelautan, efisiensi terlihat dari bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran yang terbatas untuk mendukung keberlanjutan program serta peningkatan kesejahteraan nelayan, sehingga setiap rupiah yang digunakan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan hasil tangkapan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan penguatan ekonomi lokal (Hutajulu et al., 2024).

g. Penegakan hukum

Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil, dan konsisten. Visi strategis Pemerintah dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia (*Human Development*). Prinsip-prinsip good governance berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Good governance merupakan salah satu bagian dari isu kebijakan strategis yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Setiap aktivitas pada instansi pemerintah dapat mengaplikasikan konsep good governance

h. Responsivitas

Responsivitas menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena menunjukkan adanya relasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah tidak hanya hadir sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang cepat dan berkualitas (Silalahi & Syafri, 2015).

i. Visi Strategis

Visi strategis merupakan cara pandang yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Visi strategis adalah rancangan kegiatan/program apa yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan negara. Cara pandang yang strategis akan membuat suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas serta berkelanjutan terhadap pembangunan, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Visi ini tidak hanya menjadi arah pembangunan, tetapi juga landasan dalam merancang kebijakan publik yang mampu menjawab tantangan masa depan secara berkelanjutan. Dalam konteks tata kelola kelautan, visi strategis berarti menyusun kebijakan perikanan dan kelautan yang berpihak pada keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. *Blue economy*

Konsep *Blue economy* pertama kali diperkenalkan oleh ekonomi Belgia, Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul “The Blue economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs.” Pada tahun 2010, Pauli mengusulkan perubahan fundamental dalam proses industri untuk mengatasi masalah lingkungan (Putra & Asri, 2023) . Ia menekankan pentingnya menggantikan sumber daya energi langka dan mahal dengan teknologi yang lebih sederhana dan bersih. World Bank kini mendefinisikan *Blue economy* sebagai penggunaan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, sambil menjaga ekosistem laut yang rentan (Hutajulu et al., 2024). Konsep *Blue economy* telah menjadi topik penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut di negara-negara pesisir, termasuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kekayaan laut yang sangat melimpah, berikut indikator untuk mendukung ketercapaian *blue economy*.

a. Efisiensi Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam adalah usaha manusia dalam mengubah ekosistem untuk memperoleh manfaat maksimal, dengan mengupayakan kesinambungan produksi dan menjamin kelestarian sumber daya tersebut. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan

(SURYANTI et al., 2019). Dalam pengelolaan lingkungan sumber daya pesisir tidaklah bersifat serta merta atau latah, namun kita perlu mengkaji secara mendalam isu dan permasalahan mengenai sumber daya yang hendak dilakukan pengelolaan. Penting atau tidaknya sumber daya alam yang ada, potensi dan komponen sumber daya mana yang perlu dilakukan pengelolaan dan apakah terdapat potensi dampak kerusakan lingkungan, serta untung atau tidaknya sumber daya tersebut bagi masyarakat merupakan pertimbangan penting dalam pengelolaan

b. Keberlanjutan Ekosistem

Keanekaragaman hayati pesisir dan lautan Indonesia hadir dalam bentuk ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, pantai, laut terbuka dan laut jeluk (laut dalam). Berbagai ekosistem tersebut saling berhubungan secara sinergis melalui aliran arus air dan migrasi biota (Nengsih, 2020).

Tingginya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan lautan Indonesia, baik dalam bentuk keanekaragaman genetic, spesies maupun ekosistem merupakan aset yang sangat berharga untuk menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi keanekaragaman hayati yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan menjaga keberlanjutan ekosistem ini, manfaat yang dihasilkan tidak hanya melindungi keseimbangan lingkungan, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelestarian

keanekaragaman hayati ini sangat penting untuk memastikan ekosistem tetap memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi saat ini dan masa depan.

Rencana Laut Berkelanjutan harus sejalan dengan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, yang dibangun di atas pengelolaan laut terintegrasi dan pengetahuan ekosistem, mengatasi tekanan dari semua sumber berbasis darat dan laut, serta memperhitungkan perkiraan dampak perubahan iklim. Sebagai dasar ekonomi laut berkelanjutan, rencana ini harus dikembangkan dan dilaksanakan melalui proses yang inklusif, partisipatif, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Secara teoritis masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan (Sabarisman, 2017). Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan.

Dalam konteks kehidupan sosial, kesejahteraan masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan harmoni sosial. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, kualitas interaksi sosial

meningkat, sehingga tercipta masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan kooperatif. Dari sisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi. Peningkatan akses terhadap pekerjaan, pendapatan yang layak, dan perlindungan sosial memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik mendorong kesejahteraan sosial melalui pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat menjadi indikator penting dari keberhasilan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi secara terpadu.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan wilayah pesisir hanya bertumpu pada aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan pemerintah yang bersifat top down membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelestarian sumber daya alam, bahkan sebagian besar dari mereka berperilaku merusak dan mengancam daya dukung berkelanjutan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam (Siburian, 2021).

3. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Pengelolaan sumber daya alam laut merupakan serangkaian kegiatan sebagai upaya dalam mengelola dan mengeksplorasi sumber daya alam laut secara optimal guna tercapainya tujuan tertentu (Wibowo et al., 2021). Pengelolaan potensi sumber daya kelautan ini, penting untuk menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan laut. Dengan

memanfaatkan keberagaman hayati dan keindahan alam laut secara bertanggung jawab, Indonesia dapat terus menjadi pemimpin dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya kelautan untuk kesejahteraan generasi mendatang. Secara umum konsep strategi pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian kebijakan atau tindakan yang dilakukan secara terus menerus, dengan memanfaatkan peluang, ancaman dan sumberdaya serta kemampuan yang dimiliki, pada setiap tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara berkelanjutan.

4. Program Rumpon

Rumpon adalah salah satu teknologi yang berfungsi mengumpulkan atau mengkonsentrasikan ikan pada suatu perairan untuk memudahkan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang sesuai, karena posisi daerah penangkapan telah diketahui sejak dini. Peraturan Menteri KKP terbaru nomor 18/2021 (KKP 2021) pasal 16 butir a, mewajibkan jarak antara rumpon tidak kurang dari sepuluh (10) mil laut, tidak mengganggu alur pelayaran, ditempatkan sesuai dengan daerah penangkapan ikan, tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan, tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut. Rumpon diyakini dapat meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan menurunkan biaya operasi penangkapan ikan yang lebih rendah, karena nelayan dapat memperhitungkan jarak antara pelabuhan dengan daerah penangkapan ikan (tempat peletakan rumpon) yang akan dituju.

Penggunaan rumpon telah menjadi bagian integral dalam praktik perikanan tradisional maupun modern di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.

Implementasi program rumpon tidak hanya mempengaruhi aspek teknis penangkapan ikan, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap ekologi laut, perekonomian nelayan, dan dinamika sosial masyarakat pesisir.

Tantangan untuk memelihara sumber daya ikan yang sehat menjadi isu yang cukup kompleks dalam pembangunan perikanan. Dalam konsep pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan terdapat tiga komponen penting yang berjalan dalam kondisi berimbang, yaitu: ekologi, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketiga aspek tersebut agar tujuan dari program rumpon ini dapat dioptimalkan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat nelayan dan kelestarian lingkungan laut.

a. Aspek ekologi

- 1) Rumpon dangkal membantu dalam pemulihan ekosistem laut dengan menyediakan habitat bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya.
- 2) Dengan menarik ikan ke area kawasan rumpon dapat mengurangi tekanan penangkapan ikan di sekitar terumbu karang, sehingga melindungi terumbu karang dari kerusakan.
- 3) Rumpon berkontribusi pada peningkatan keanekaragaman ekosistem laut dengan menarik berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya untuk tinggal dan berkembang biak.

b. Aspek ekonomi

- 1) Dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan dengan ikan yang berkumpul di sekitar rumpon, nelayan dapat dengan mudah

menangkap ikan tanpa harus pergi jauh ke laut lepas, mengurangi biaya operasional.

- 2) Rumpon juga dapat menarik wisatawan untuk menyelam dan memancing sebagai sumber pendapatan, membuka peluang baru bagi masyarakat pesisir untuk menghasilkan uang.
- 3) Dengan ikan yang berkumpul di sekitar perairan dangkal, sehingga nelayan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk bahan bakar dan peralatan, meningkatkan efisiensi dan keuntungan.

c. Aspek Sosial

- 1) Dengan meningkatnya hasil tangkapan dan peluang pendapatan dari pemanfaatan rumpon, kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat.
- 2) Program ini dapat digunakan sebagai sarana pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan praktik perikanan yang berkelanjutan.
- 3) Program ini dapat memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antara nelayan dan masyarakat pesisir lainnya dengan bekerja sama dalam pemasangan dan pemeliharaan rumpon

Terdapat berbagai jenis rumpon yang diklasifikasikan berdasarkan lokasi pemasangan dan sifat pergerakannya yakni rumpon permukaan, rumpon layang dan rumpon dasar. Memahami perbedaan jenis-jenis rumpon ini penting bagi nelayan dan pengelola perikanan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut

Gambar 2 2 Rumpon

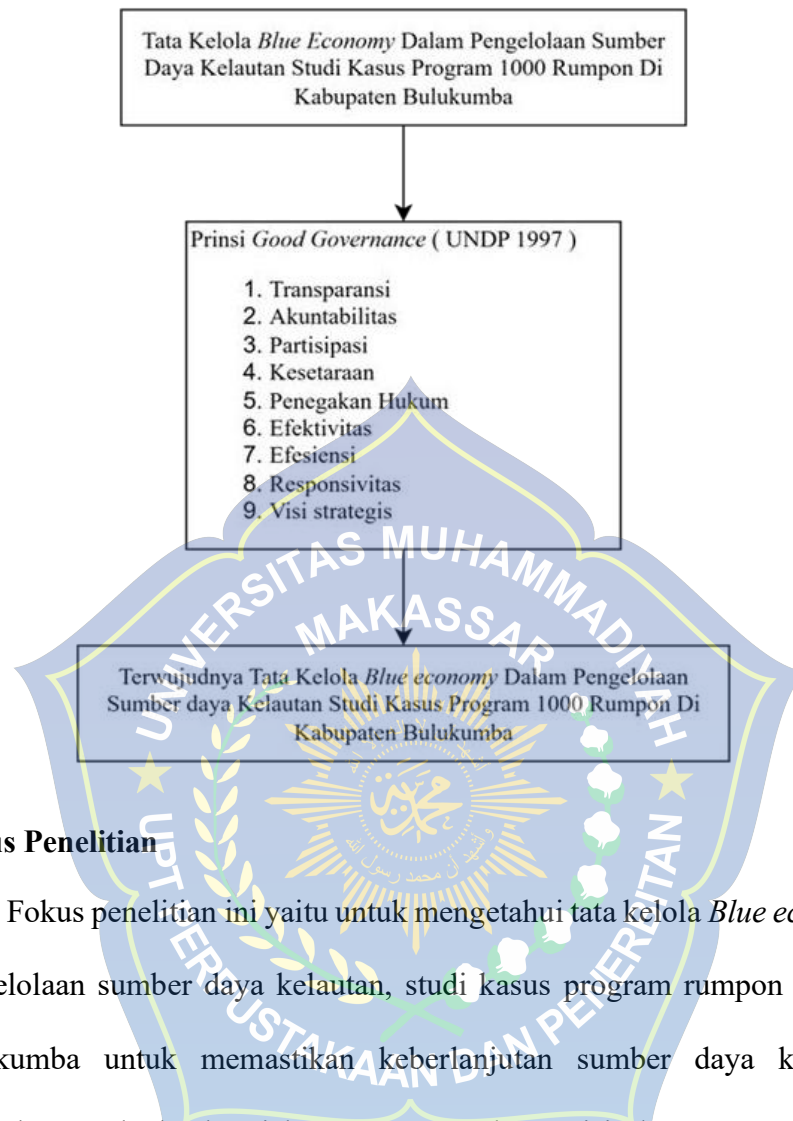


Sumber Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba

C. Kerangka Pikir

Model kerangka pikir dalam penelitian ini dikembangkan untuk memperjelas hubungan antara teori dan faktor-faktor utama yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini mengangkat isu pengelolaan sumber daya kelautan dengan pendekatan *blue economy* sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba melalui implementasi program 1000 rumpon. Dalam kerangka ini, teori *good governance* yang dirumuskan oleh UNDP (1997) digunakan sebagai dasar analisis, mengingat prinsip-prinsipnya meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, penegakan hukum, efektivitas, efisiensi, responsivitas serta visi strategis sejalan dengan nilai-nilai inti *blue economy*, seperti keberlanjutan sumber daya, inklusivitas sosial, dan optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal

Gambar 2 3 Kerangka pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui tata kelola *Blue economy* dalam pengelolaan sumber daya kelautan, studi kasus program rumpon di Kabupaten Bulukumba untuk memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir dengan merujuk pada teori *good governance* menurut UNDP 1997 (*United Nations Development Programme*) meliputi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, penegakan hukum, efektifitas, efesiensi, responsivitas dan visi strategis.

E. Deskripsi Penelitian

1. Prinsip *Good governance* yaitu :

- a. Transparansi dalam penelitian ini berfokus pada keterbukaan informasi oleh

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait penyampaian informasi kepada masyarakat serta distribusi manfaat program rumpon bagi nelayan.

- b. Akuntabilitas dalam penelitian ini untuk menilai pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dalam mengelola program termasuk pelaporan kinerja, evaluasi program serta memastikan program berjalan efektif
- c. Partisipasi dalam hal ini untuk menilai keterlibatan aktif nelayan dalam memanfaatkan program rumpon, serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
- d. Kesetaraan dalam Penelitian ini untuk melihat sejauh mana distribusi akses, peran, dan manfaat program rumpon secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat, guna memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan.
- e. Penegakan hukum dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana regulasi terikat dalam program ini, pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan rumpon dan memastikan kepatuhan terhadap aturan, mencegah praktik ilegal, serta melindungi ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan.
- f. Efektivitas untuk menganalisis efektivitas dari program rumpon dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, seperti meningkatkan hasil tangkapan nelayan, memperkuat ekonomi pesisir, dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.

- g. Efisiensi dalam Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan sumber daya baik anggaran dari program serta efektivitas dari waktu, tenaga dan modal untuk hasil yang optimal bagi nelayan sebagai penerima manfaat.
- h. Responsivitas dalam penelitian ini untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan secara cepat dan tepat, terutama dalam mendukung keberhasilan program rumpon.
- i. Visi Strategis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah memiliki arah dan rencana jangka panjang dalam menjamin keberlanjutan program 1000 rumpon serta dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dimulai dari bulan Mei hingga Juni tahun 2025. Lokasi penelitian dilaksanakan di kabupaten Bulukumba terkhusus lokasi yang menerima program rumpon, dan Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba. Alasan penulis memilih Lokasi ini dikarenakan sangat relevan terhadap perannya yang penting dalam pengelolaan sumber daya laut yang ada di Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan tipe penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana tata kelola Blue economy diterapkan dalam konteks lokal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami penerapan antara prinsip-prinsip *good governance* dengan praktik pengelolaan rumpon di Kabupaten Bulukumba. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait kebijakan atau laporan program rumpon. Melalui penelitian kualitatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika tata kelola sumber daya kelautan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat implementasi *blue economy* di Kabupaten Bulukumba.

C. Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi yang digunakan dalam penelitian sebagai rujukan atau dasar. Sumber ini berasal dari sumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan analisis dan menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian. Dengan kata lain, sumber-sumber ini memberikan landasan faktual dan empiris untuk proses pengumpulan informasi.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yaitu dinas perikanan kabupaten Bulukumba dan masyarakat penerima program, observasi lapangan serta dokumentasi yang dihasilkan dari interaksi langsung dengan subjek penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber – sumber yang telah ada dan terdokumen sebelumnya, seperti laporan, dokumen resmi, buku, jurnal dan publikasi lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan kualitatif pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dalam konteks yang alami untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena sosial. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa ada tiga teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi (sugiyono, 2013). Pengumpulan data terbagi ke dalam tiga jenis teknik yaitu.

1. Observasi

Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti. Peneliti mengamati perilaku, kejadian, atau kondisi yang relevan dengan topik penelitian. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif (peneliti terlibat dalam kegiatan yang diamati) atau non- partisipatif (peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat).

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih dalam dari individu atau kelompok terkait. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang mendalam dan langsung dari responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi mengacu pada pengumpulan data melalui dokumen yang ada, seperti arsip, laporan, catatan, atau media lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini berguna untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung atau melengkapi data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:218) teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik *purposive sampling* memilih sekelompok subyek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai

memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Karakteristik ini sudah diketahui oleh peneliti. Sehingga mereka hanya perlu menghubungkan unit sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Tabel 3 1 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Kusnadi Kamal,S,STP, M.Si	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba	KK
2.	Yusli Sandi,S.Kel,M.Si	Kepala Bagian Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba	YS
3.	Ahmad Affan	Penerima Rumpon/ Komunitas Nelayan	AF
4.	Karoma	Penerima Rumpon	KR
5.	Hardianto	Penerima Rumpon	HD

F. Teknik Analisis Data

Model analisis data yang terdapat dalam buku Miles dan Huberman yaitu *Qualitatif Data Analisis*. Pada dasarnya model analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme (Sidiq et al., 2019). Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh berikut ini adalah beberapa Teknik analisis data yang digunakan Menurut Miles and Huberman ada tiga serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yang terdiri dari, sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyaring, memilah, dan mengorganisir data agar informasi yang relevan dan penting dapat dianalisis lebih lanjut. Proses ini merupakan bagian dari analisis data dalam penelitian kualitatif, yang bertujuan

untuk mengurangi data yang tidak perlu untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat. Reduksi data membantu peneliti untuk memusatkan perhatian pada pola atau tema utama yang muncul dalam penelitian.

2. Penyajian data

Teknik penyajian data adalah menyajikan hasil penelitian yang bertujuan untuk memberikan kebenaran data dan memudahkan pemahaman analisis data. Penyajian data yang efektif membantu peneliti atau audiens untuk menarik kesimpulan yang tepat dari data yang ada. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data proses ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik makna dari data yang telah dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk merujuk apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi dan menjaga keabsahan data yang diperoleh. Sugiyono (2013) Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.. Adapun Teknik triangulasi yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member cheek) dengan tiga sumber data tersebut.

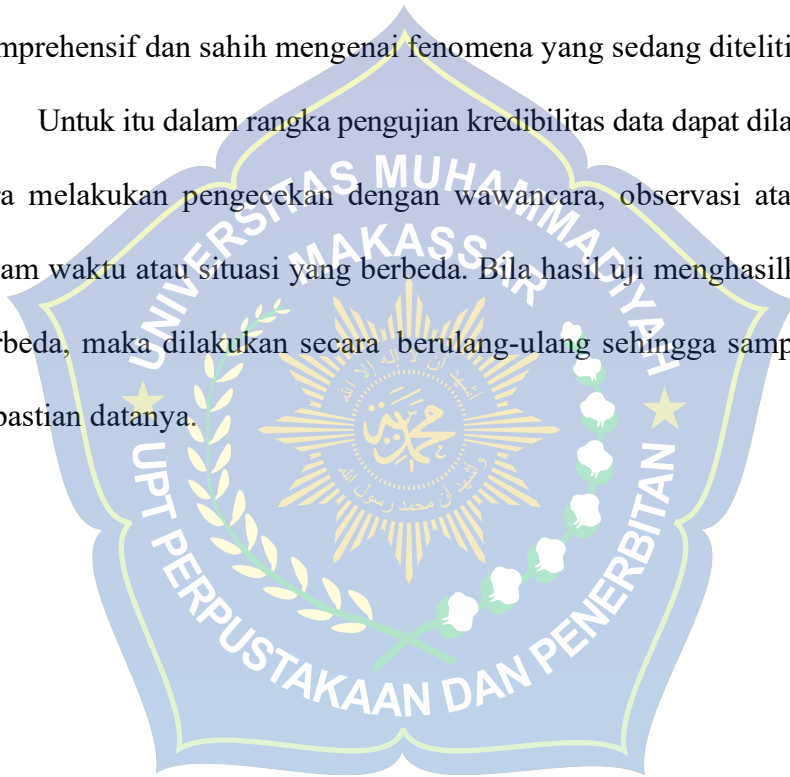
2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena atau kejadian dari beberapa titik waktu yang berbeda, guna mengevaluasi konsistensi atau perubahan dalam temuan yang diperoleh. Dengan menerapkan triangulasi waktu, peneliti dapat menilai stabilitas atau perubahan dalam temuan yang ada seiring berjalannya waktu, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan sahih mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jajarah Sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 kilometer dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan terletak antara 05020' – 05040' lintang selatan dan 119058' – 120028' bujur timur. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur dengan Teluk Bone, sebelah selatan dengan Laut Flores, dan sebelah barat dengan Kabupaten Bantaeng (BPS, n.d.).

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 km² atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi luas kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,51 km² dan 171,33 km² sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 14,4 km² atau hanya sekitar 1 persen. Suhu rata-rata berkisar antara 23,82 0 C – 27,68 0 C (DPM-PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN, n.d.). Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian termasuk perikanan. Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara bulan oktober- maret dan musim rendengan antara april-september. Daerah dengan curah hujan tertinggi

terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah.

Dilihat dari perspektif geografis, Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah dengan potensi besar dalam bidang kelautan dan perikanan. Wilayah ini terletak di antara dua lautan, yaitu Laut Flores dan Teluk Bone. Posisi ini sangat strategis, menjadikan Kabupaten Bulukumba sebagai pusat pelayanan maritim bagi wilayah selatan Sulawesi Selatan. Bahkan, dengan letak ini, Bulukumba diperkirakan akan menjadi pusat pelayanan di bagian timur Indonesia. Selain itu, karena posisi geografisnya, nelayan di Bulukumba hampir tidak terpengaruh oleh pergantian musim. Saat musim barat, ketika gelombang besar melanda Laut Flores, mereka dapat beralih ke Teluk Bone untuk menangkap ikan, dan sebaliknya pada musim timur, nelayan berpindah ke Laut Flores untuk melanjutkan aktivitas penangkapan. Keadaan ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan produksi perikanan, karena para pelaku usaha mendapatkan kepastian pasokan yang terus-menerus.

2. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba

Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba adalah instansi daerah yang memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di Kabupaten Bulukumba. Instansi ini berada di bawah Bupati dan melapor kepada Sekretaris Daerah. Sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perikanan, Dinas Perikanan menjalankan wewenang desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan di sektor perikanan dan kelautan sesuai

dengan peraturan yang ada.

Struktur organisasi Dinas Perikanan dirancang untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023, Dinas Perikanan terdiri atas Sekretariat, beberapa bidang, serta unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Sekretariat bertanggung jawab atas pelayanan administratif dan operasional, sementara bidang-bidang dalam dinas mencakup pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Tiap bidang memiliki seksi-seksi yang menangani fungsi teknis yang lebih spesifik, memungkinkan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Fungsi utama Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan perikanan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan, serta pengembangan inovasi di sektor kelautan dan perikanan. Dalam menjalankan fungsinya dinas perikanan Kabupaten Bulukumba memiliki visi dan misi sebagai wujud tanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya.

a. Visi Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba

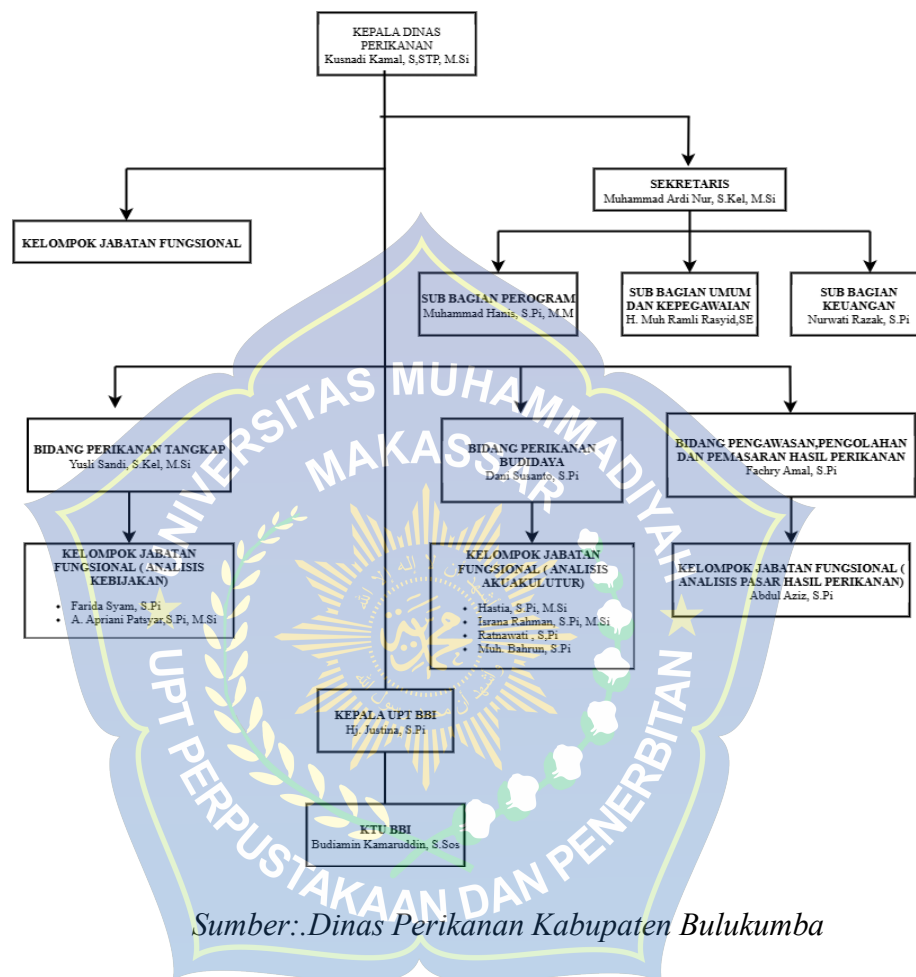
“Mewujudkan masyarakat produkti yang berkarakter kearifam lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera”

b. Misi Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba

“Meningkatkan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah nasional dan internasional”

c. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba

Gambar 4 1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba



d. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba

- 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang perikanan
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan
- 3) Koordinasi penyediaan infrastruktur pendukung dibidang perikanan
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang perikanan
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan
- 6) Pelaksanaan administrasi di Dinas Perikaanan

7) Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang dan tugas yang diberikan

3. Deskripsi Program Rumpon Di Kabupaten Bulukumba

Program 1000 rumpon merupakan salah satu inisiatif strategis yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Perikanan sebagai bentuk intervensi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Program ini didesain untuk menjawab tantangan rendahnya hasil tangkapan nelayan tradisional akibat keterbatasan akses terhadap wilayah tangkap yang produktif dan berkurangnya populasi ikan di beberapa area pesisir. Rumpon, atau rumah ikan, selama ini dikenal sebagai alat bantu ekstraksi sumber daya ikan yang ditempatkan di wilayah perairan Bulukumba. Praktik ini berdampak pada perubahan pola migrasi ikan pelagis, yang semakin menjauh dari perairan dangkal Bulukumba. Akibatnya, nelayan kecil kesulitan menangkap ikan dan biaya operasional mereka meningkat.

Program ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2020 periode pertama bupati terpilih dan secara bertahap terus diperluas hingga memenuhi visi dari program tersebut. Sejauh ini pendistribusian unit rumpon hingga tahun 2024 sebanyak 687 unit dan terus diupayakan keberlanjutan dari program tersebut.

Tabel 4.1 Jumlah Distribusi Rumpon

Tahun	Jumlah unit Rumpon
2021	13 unit
2022	139 unit
2023	123 unit
2024	412 unit
Total	687 unit

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba

B. Hasil Penelitian Tentang Tata Kelola Blue Economy Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Studi Kasus Program 1000 Rumpon Di Kabupaten Bulukumba

Hasil penelitian mengenai tata kelola *Blue economy* dalam pengelolaan sumber daya kelautan melalui program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba. Fokus analisis terletak pada bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, penegakan hukum, serta efektivitas, efisiensi, responsivitas serta visi strategis guna menjawab rumusan masalah, bagaimana tata kelola *blue economy* dalam pengelolaan sumber daya kelautan melalui program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba. Dalam penelitian ini, *blue economy* dipahami sebagai pendekatan pembangunan sektor kelautan yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, serta pemberdayaan masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi.

Sejalan dengan itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, penegakan hukum, efektivitas, efisiensi, responsivitas, hingga visi strategis, telah mencerminkan arah kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai *blue economy*. Dengan kata lain, prinsip-prinsip tata kelola yang diterapkan dalam program 1000 rumpon bukan hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga berperan penting dalam mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat pesisir.

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis berdasarkan kelima indikator tersebut. Penyajian data dilengkapi narasi dari informan kunci, baik dari pihak pelaksana maupun nelayan penerima manfaat. Melalui pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola kelautan yang berkelanjutan.

1. Governance

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu konsep yang menggambarkan mekanisme interaksi antar aktor dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pengelolaan sumber daya secara kolektif. Dalam konteks sumber daya kelautan, tata kelola mencerminkan kerangka normatif dan institusional yang mengatur peran serta tanggung jawab berbagai pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya.

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, pembahasan penelitian ini memfokuskan terhadap sejumlah indikator utama tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, penegakan hukum, efektivitas, efesiensi dan responsivitas. Setiap indikator dianalisis secara kritis dengan merujuk pada data empiris dari pelaksanaan program rumpon di tingkat lokal.

a. **Transparansi**

Dalam usaha untuk mencapai pengelolaan sumber daya kelautan yang mengedepankan *blue economy*, transparansi sangat penting untuk memastikan keberhasilan keberlanjutan program. Dalam konteks program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba, elemen ini menggambarkan mutu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat nelayan sebagai pengguna program.

Maka dari itu untuk melihat program ini tepat sasaran langkah awalnya adalah bagaimana penyampaian informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses program dan perkembangan pelaksanaan program. Hal ini diungkapkan kepala bagian tangkap dinas perikanan kabupaten Bulukumba terkait keterbukaan informasi terhadap penyampaian program rumpon kepada nelayan, mengungkapkan bahwa:

“Untuk menyampaikan informasi ini kepada nelayan terkait ini bantuan biasanya kita lakukan penyuluhan di beberapa kecamatan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, Selain itu ada juga yang kita sebar melalui website (*kelautanperikanan.net*) untuk memudahkan informasi dan pengajuan proposal bantuan.” (Wawancara bersama YS, pada hari Jumat 9 Mei 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya jalur komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan lembaga teknis pelaksana. Mekanisme semacam ini merupakan bentuk transparansi dalam pengambilan keputusan publik, di mana kebijakan tidak diputuskan secara tertutup, tetapi melibatkan struktur pemerintahan yang jelas dan terstruktur. Dinas Perikanan sebagai fasilitator program yang langsung terlibat dalam penyuluhan dan pendampingan teknis kepada masyarakat menunjukkan upaya untuk menjamin keterbukaan informasi terkait tujuan, manfaat, dan tata cara pelaksanaan program kepada para penerima manfaat utama, yaitu nelayan lokal.

Pemanfaatan informasi melalui situs web resmi yang menjadi langkah Strategi ini mencerminkan bentuk adaptasi terhadap prinsip transparansi dan digitalisasi pelayanan publik yang selaras dengan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Melalui pendekatan digital ini, akses terhadap informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat, meskipun tetap menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses internet di beberapa wilayah pesisir, pandangan dari masyarakat nelayan juga penting untuk menunjukkan sejauh mana transparansi informasi benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat.

Gambar 4 2 Platform Digital Dinas Perikanan Kab.Bulukumba



Sumber : <https://www.kelautanperikanan.net/>

Berdasarkan platform digital dari Dinas Perikanan Kab. Bulukumba dalam merepresentasikan upaya pemerintah dalam menyediakan media informasi digital yang mendukung transparansi dan partisipasi publik dalam sektor kelautan dan perikanan di Kab.Bulukumba. Melalui tampilan yang menyertakan fitur seperti (pendaftaran proposal, survey dampak ekonomi, dan buku panduan program, platform ini menunjukkan adanya transformasi layanan yang memberikan kemudahan akses, transparansi informasi, dan efektivitas dalam penyampaian proposal.

Dalam pengajuan proposal bantuan rumpon dalam website ini menyediakan mekanisme pendaftaran berbasis daring, di mana pengguna diwajibkan mengisi data pokok seperti identitas pemohon, jenis kegiatan perikanan (budidaya, tangkap, pengolahan), lokasi kelompok, serta kebutuhan bantuan yang diusulkan. Dokumen pendukung seperti legalitas kelompok, proposal kegiatan, dan RAB menjadi syarat administratif yang wajib disertakan.

Hal ini dikonfirmasi pula oleh narasumber dari nelayan yang menerima bantuan.

”kebetulan waktu saya menerima bantuan ini langsung dari dinas perikanan yang menawari atau kabari saya tapi tetap lewat prosedur yang ada”(Wawancara dengan Nelayan KR, pada hari Minggu 11 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyaluran bantuan program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba, Dinas Perikanan memainkan peran sentral sebagai penghubung utama antara pemerintah daerah dan kelompok nelayan. Pendekatan langsung yang dilakukan oleh dinas ini menggambarkan adanya inisiatif dari pihak pemerintah untuk mempercepat proses distribusi bantuan. Selain itu, pola penyaluran mendeteksi secara bijak kebutuhan masyarakat pesisir secara langsung yang tidak hanya mengandalkan permohonan dari bawah, tetapi juga melalui proses identifikasi proaktif terhadap calon penerima manfaat yang dianggap layak.

Dari data 2 tahun terakhir sebagai pendukung data sekunder dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen realisasi bantuan rumpon tahun 2023–2024 yang diperoleh dari Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba. Data ini memuat informasi mengenai nama kelompok nelayan penerima bantuan, nama ketua kelompok, alamat, jumlah rumpon yang diterima, serta nomor registrasi bantuan. Keberadaan data ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba telah melakukan pencatatan yang sistematis dan transparan dalam proses pendistribusian rumpon kepada kelompok nelayan.

Adapun tabel terperinci data realisasi bantuan rumpon 2 tahun terakhir tahun 2023 dan 2024 ditampilkan pada bagian lampiran sebagai

bentuk dokumentasi dan data pendukung dari penelitian ini

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan indikator dalam mengukur keterpaduan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya bermakna sebagai kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan program, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi berjalannya suatu program agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Dinas Perikanan kabupaten Bulukumba sebagai pelaksana memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan sasaran, sehingga program tidak hanya bersifat populis, tetapi berdampak nyata di lapangan.

“Setiap bantuan dari dinas perikanan sendiri itu, termasuk permintaan rumpon oleh nelayan, itu kita verifikasi berdasarkan apa kebutuhannya nelayan.” (Wawancara bersama YS, pada hari Jumat 9 Mei 2025)

Dalam pelaksanaan program 1000 rumpon, akuntabilitas tercermin dari proses verifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perikanan sebelum bantuan disalurkan kepada nelayan. Informan menyebutkan bahwa setiap permintaan rumpon oleh kelompok nelayan terlebih dahulu diverifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi masing-masing penerima manfaat.

Distribusi sarana bantu penangkapan ikan seperti rumpon merupakan bagian dari intervensi pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap. Pelaksanaan distribusi ini umumnya dilakukan melalui mekanisme kelembagaan nelayan yang telah ditetapkan, dengan harapan mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dalam konteks tata kelola *blue economy*, keberhasilan program semacam ini tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif seperti jumlah rumpon yang terpasang, tetapi juga dari kualitas proses distribusi dan keterlibatan aktor-aktor lokal dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam proses implementasi khususnya terkait aspek sosialisasi dan diseminasi informasi. Kurangnya komunikasi yang efektif antara penyelenggara program dan komunitas nelayan dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman serta menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini dirasakan oleh salah satu informan

“Distribusi rumpon ini memang dilakukan secara berkelompok saya selaku ketuanya yang jadi perantara, waktu saya menerima bantuan ini melalui verifikasi administrasi dari Dinas Perikanan. (Wawancara bersama AF, pada hari Rabu 21 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang juga mengkritisi bagaimana mekanisme dalam penyampaian program ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan distribusi bantuan rumpon dalam program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba telah dilakukan melalui pendekatan berbasis

kelompok, dengan ketua kelompok nelayan berperan sebagai penghubung antara Dinas Perikanan dan para nelayan penerima manfaat. Proses verifikasi administratif juga telah menjadi bagian dari mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan rumpon digunakan sesuai aturannya dan menilai sejauh mana dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Monitoring dan evaluasi yang efektif menjadi instrumen penting dalam mencegah penyimpangan, mendeteksi kendala teknis di lapangan, Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh kepala bagian tangkap dinas perikanan kabupaten Bulukumba.

“Untuk mengevaluasi program ini kami melakukan survei untuk melihat kondisi dilapangan, baik itu melihat kondisi rumpon yang terpasang dan mendata sejauh mana hasil tangkapan dari nelayan” (Wawancara bersama YS, pada hari Jumat 09 Mei 2025)

“Survei kami lakukan terakhir itu ditahun 2024” (Wawancara bersama YS, pada hari Jumat 09 Mei 2025)

Proses evaluasi ini dilakukan melalui survei langsung ke lokasi pemasangan rumpon yang bertujuan untuk meninjau kondisi aktual dilapangan dari rumpon yang telah dipasang serta mengumpulkan data terkait hasil tangkapan nelayan. Menurut informan kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme monitoring, tetapi juga merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban institusional terhadap jalannya program. Dengan pendekatan tersebut, dinas perikanan dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap sejauh mana bantuan yang

diberikan mampu meningkatkan produktivitas nelayan dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir

c. **Partisipasi**

Menurut (Warnida, 2022) Soetrisno yang menyatakan terdapat dua definisi mengenai partisipasi yang beredar di kelompok masyarakat. Definisi pertama menyatakan bahwa partisipasi adalah dukungan kelompok masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan oleh seorang perencana. Definisi kedua menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan adalah kerja sama yang erat antara perencana dan kelompok masyarakat dalam melakukan perencanaan, melaksanakan, pelestarian dan melakukan pengembangan hasil pembangunan yang sudah dicapai sebelumnya. Partisipasi menjadi indikator dalam menilai tata kelola program rumpon di Kabupaten Bulukumba, khususnya dalam konteks keterlibatan pemangku kepentingan. Sesuai dengan fokus penelitian ini, partisipasi dipahami sebagai keterlibatan pemangku kepentingan dalam tiga aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

“Sebetulnya kita melihat dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat baik itu mereka meminta semacam rumpon atau kebutuhan lainnya sebelum kita distribusi, setelah itu kita suruh tim kelapangan untuk malukan pendampingan tenknis pemasangan (Wawancara bersama YS, pada hari Jumat 09 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya proses pengumpulan informasi dari masyarakat sebelum intervensi program dilakukan. Lebih lanjut, setelah kebutuhan ditentukan, dilakukan pula pendampingan teknis di

lapangan. Langkah ini menunjukkan adanya keberlanjutan partisipasi dalam tahap implementasi, bukan hanya sekadar pada perencanaan. Keterlibatan tim teknis untuk mendampingi masyarakat dalam pemasangan rumpon berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan, agar masyarakat memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkan bantuan secara optimal.

Adapun pernyataan tambahan yang diberikan oleh kepala dinas perikanan kab. Bulukumba yang mengatakan bahwa:

“Iya, jadi kita selalu terjun dilapangan untuk terus memberikan informasi dan bimbingan. Jadi, tidak hanya bantuan rumpon dikasih terus selesai. Kita pastikan nelayan tahu bagaimana memelihara dan memanfaatkannya secara optimal”(Wawancara dengan KK, pada hari Rabu 14 Mei 2025)

Informan tersebut sangat menekankan pentingnya kehadiran langsung di lapangan sebagai bentuk komitmen terhadap keberhasilan program. keterlibatan tim pendamping tidak terbatas pada tahapan distribusi bantuan rumpon saja. Mereka harus secara konsisten turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa para nelayan memahami fungsi dan cara pengelolaan rumpon mengenai teknik penggunaan rumpon yang ramah lingkungan dan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap habitat laut secara tepat. Ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak bersifat simbolik, melainkan nyata dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat nelayan agar mampu mandiri dalam pengelolaan alat bantu penangkapan ikan tersebut.

Gambar 4 3 Sosialisasi Dan Bimbingan Program Rumpon



Sumber: radarselatan.fajar.co.id

Bimbingan teknis menjadi bagian integral dari pendekatan pendampingan. Informan menjelaskan bahwa setelah rumpon disalurkan, pihak pendamping secara aktif memberikan arahan mengenai cara memelihara dan memanfaatkannya secara optimal. Pendekatan ini menunjukkan adanya partisipasi dalam bentuk fasilitasi, yang bertujuan membangun kapasitas lokal dan memperkuat kemandirian nelayan dalam memanfaatkan bantuan yang diterima.

Lebih jauh, model pendampingan seperti ini mencerminkan bentuk partisipasi kolaboratif, di mana pendamping dan masyarakat penerima manfaat bekerja bersama dalam upaya mencapai tujuan bersama. Bukan hanya sekadar menyampaikan instruksi, tetapi juga menciptakan ruang dialog dan pembelajaran yang memungkinkan nelayan memahami alasan di balik praktik-praktik yang dianjurkan. Dengan demikian, terjadi proses transformasi pengetahuan yang bersifat dua arah dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program rumpon tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana, tetapi juga oleh

intensitas dan kualitas interaksi antara pendamping dan masyarakat

Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik dalam kegiatan, tetapi juga mencakup sikap, inisiatif, dan kesediaan individu untuk berkontribusi demi kepentingan bersama. Pada implementasi Program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba, partisipasi nelayan terlihat tidak hanya dalam pemanfaatan fasilitas yang disediakan, tetapi juga dalam cara mereka memaknai kepemilikan dan akses terhadap sumber daya laut.

Gambar 4 4 Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Rumpon



Sumber: Dokumentasi Nelayan oleh Ahmad Affan

Dokumentasi visual tersebut menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat pesisir dalam pengelolaan rumpon sebagai bagian dari upaya pelestarian sumber daya perikanan. Terlihat bahwa para nelayan bekerja sama di atas perahu tradisional dalam menyusun struktur rumpon yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan pelepah kelapa, serta menggunakan perlengkapan teknis sederhana. Kegiatan ini mencerminkan

tidak hanya keterlibatan fisik, tetapi juga integrasi pengetahuan lokal dengan praktik konservasi perikanan yang berkelanjutan

d. **Penagakan Hukum**

Penegakan hukum dan regulasi merupakan aspek dalam mengelola sumber daya kelautan yang berkelanjutan, termasuk dalam pelaksanaan program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba. Keberadaan kerangka hukum yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku menjadi indikator penting dalam menjamin bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan, tidak menyimpang dari ketentuan, dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat nelayan. Dalam konteks ini, program bantuan rumpon sebagai bagian dari kebijakan *blue economy* tidak hanya dituntut untuk sukses secara teknis dan ekonomi, tetapi juga secara kelembagaan dan normatif.

Berdasarkan wawancara dengan informan memang secara regulatif dalam program ini telah dimulai melalui sistem pendataan yang terpadu, penyuluhan teknis, serta adanya kriteria administrasi bagi penerima manfaat. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan belum optimalnya pengawasan formal, kurangnya sosialisasi peraturan, dan lemahnya penegakan standar teknis.

”Untuk aturan dalam program rumpon ini kita tidak punya aturan seperti perda, cuma kita sampaikan kepada nelayan aturan-aturan teknis seperti, jumlah rumpon yang diberikan kepada nelayan, jarak pemasangan, kita hanya ikut aturan menteri KKP tentang aturan rumpon sendiri” (Wawancara dengan KK, pada hari Rabu 14 Mei 2025)

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan dari pihak dinas, terungkap bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah (perda) atau regulasi khusus di tingkat kabupaten yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan program 1000 rumpon. Informan mengatakan sesuai dengan kejelasan peraturan pelaksanaan program selama ini mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya yang berkaitan dengan ketentuan teknis rumpon. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Alokasi Rumpon Pada Jalur Penangkapan Ikan III di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sama halnya yang disampaikan kepala bagian tangkap dinas perikanan kab.Bulukumba yang menjelaskan terkait fungsi pengawasan mengatakan bahwa

”Hingga saat ini belum ada lembaga tertentu yang secara aktif menyoroti program ini dan belum ada dari LSM yang mengawasi jalannya program bantuan, hanya dari dinas kami yang selalu melihat kondisi yang terjadi. kami hanya mempertegas kepada nelayan untuk “secara terbuka aktif menyampaikan aspirasinya” (Wawancara bersama YS, pada hari Jumat 9 Mei 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap program masih bersifat internal dan belum melibatkan aktor eksternal yang dapat memberikan perspektif objektif serta kontrol sosial yang lebih kuat. Ketiadaan lembaga pengawas eksternal juga berimplikasi pada terbatasnya mekanisme evaluasi independen terhadap program, terutama dalam menilai apakah program telah dijalankan secara transparan, adil, dan sesuai dengan tujuan awal.

Sebagai respons terhadap keterbatasan pengawasan tersebut, pihak dinas menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari masyarakat nelayan. Para nelayan diharapkan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek yang turut mengawal jalannya program. Mekanisme ini menjadi bentuk pengawasan partisipatif, yang meskipun belum terlembaga secara formal, diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program 1000 rumpon di tingkat lokal.

e. **Kesetaraan**

Kesetaraan menjadi prinsip untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan manfaat pembangunan, termasuk dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, agar hal ini bisa sejalan dengan prinsip *blue economy* yang menekankan keberlanjutan dan inklusivitas dalam pengelolaan potensi laut, sehingga tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara merata.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bagian tangkap dinas perikanan Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Siapa saja nelayan boleh melakukan mengakses atau pengajuan bantuan sehingga ada transparansi mau kebutuhannya apa jadi kita layani” (Wawancara bersama YS, pada Hari Jumat 9 Mei 2025)

Menurut informan sebagai bagian prinsip kesetaraan dijalankan melalui pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh nelayan untuk

mengajukan permohonan bantuan rumpon sesuai dengan kebutuhan mereka di lapangan. Informasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan siapa saja yang dapat mengakses program ini, selama pengajuan dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh informan nelayan yang mengatakan :

“Waktu itu saya minta bantuan sebanyak 41 paket bantuan jadi berupa Rumpon dan talinya.alhamdulillah dinas juga cepat merespon kebutuhan“ (Wawancara Bersama HD,pada hari Sabtu 17 Mei 2025)

Salah satu nelayan penerima manfaat menyampaikan bahwa pernah mengajukan bantuan sebanyak 41 paket yang terdiri atas rumpon beserta talinya, dan permintaan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Perikanan. Hal ini menunjukkan adanya kesediaan pemerintah daerah untuk mendengar dan merespons aspirasi nelayan secara terbuka tanpa membedakan siapa yang mengajukan, selama prosedur yang ditetapkan dipenuhi.

Dalam Program ini yang tidak hanya tercermin dari keterlibatan fisik nelayan dalam berbagai kegiatan, tetapi juga dari kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mengambil inisiatif dan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama. Nelayan tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, tetapi juga menunjukkan rasa memiliki dan memanfaatkan akses terhadap sumber daya laut secara adil, sehingga setiap nelayan memiliki ruang yang sama dalam memperoleh manfaat dari program ini.

Hal ini di kemukakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan nelayan yang mengatakan:

“Meskipun saya mempunyai atas hak milik bantuan ini dengan teman-teman nelayan yang bergabung dengan kelompok, saya juga biarkan masyarakat terkhusus di dusun bahwa silahkan pergi memancing di rumpon itu agar kita bisa sama-sama menikmati. tetapi tetap jaga itu rumpon” (Wawancara bersama AF, pada hari Rabu 21 Mei 2025)

Keterangan dari informan mengindikasikan bahwa walaupun rumpon tersebut secara formal tercatat sebagai milik kelompok nelayan penerima bantuan, penggunaannya tetap dibuka untuk masyarakat sekitar, terutama bagi warga di wilayah dusun tempat pemasangan rumpon dilakukan. Tindakan inklusif ini menunjukkan adanya upaya pemberdayaan yang tidak terbatas pada internal kelompok, tetapi merangkul nelayan lain di lingkungan sekitar. Dalam perspektif Blue Economy, praktik ini merepresentasikan prinsip pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, di mana pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara bersama-sama dan merata. Semangat kerja sama serta tanggung jawab kolektif dalam merawat keberadaan rumpon menandakan bahwa program ini tidak semata ditujukan untuk keuntungan ekonomi sesaat, melainkan juga memperkuat kohesi sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

f. Efektivitas

Efektivitas dalam pengelolaan sumber daya kelautan merujuk pada sejauh mana tujuan strategis pengelolaan dapat dicapai, seperti pelestarian

ekosistem laut, peningkatan hasil tangkap berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Efektivitas juga dapat dinilai dari keterlibatan pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap regulasi, serta dampak nyata terhadap kondisi ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat nelayan

Efektivitas indikator dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan sumber daya kelautan melalui program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba. Indikator efektivitas mengukur sejauh mana tujuan program tercapai, sedangkan efisiensi menilai rasio antara hasil yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menunjukkan capaian positif, namun masih menyisakan tantangan teknis dan manajerial.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan kepala dinas perikanan Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

”Hadirnya rumpon ini sangat diterima oleh teman-teman nelayan tujuannya itu agar mereka mendapatkan hasil tangkapan yang cukup dan lebih cepat, selama ini kan mereka cukup jauh melaut hingga diluar laut bulukumba sehingga tidak efisien dalam mencari ikan, sehingga rumpon ini bukan alat untuk mencari ikan tapi langsung menangkap ikan di wilayah itu”(Wawancara bersama KK pada hari Rabu 14 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, informan menyatakan bahwa kehadiran rumpon sangat diapresiasi oleh para nelayan setempat. Tujuan utama dari pemasangan rumpon adalah untuk memudahkan nelayan dalam

memperoleh hasil tangkapan secara lebih cepat dan dalam jumlah yang memadai. Sebelum adanya rumpon, nelayan harus menempuh jarak yang cukup jauh, bahkan hingga ke luar wilayah perairan Bulukumba, untuk mencari titik-titik keberadaan ikan.

“Pemasangan rumpon harus dipasang sesuai aturan sehingga tetap efektif dalam menangkap ikan, rumpon harus dipasang disesuaikan titik tidak mengganggu alur pelayaran” (Wawancara bersama YS pada hari Jumat 09 Mei 2025)

ketepatan pemasangan rumpon agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah baru di wilayah perairan. Informan dari pihak dinas menegaskan bahwa pemasangan rumpon harus dilakukan di titik-titik yang sudah ditentukan, sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam membantu nelayan menangkap ikan tanpa mengganggu alur pelayaran kapal di sekitar wilayah pemasangan. praktik ini sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem, karena pengelolaan ruang laut yang tertib dan terkoordinasi berkontribusi terhadap kelestarian fungsi ekosistem serta mencegah kerusakan atau tekanan yang tidak perlu terhadap wilayah perairan. Dengan demikian, pendekatan teknis yang memperhatikan aspek keberlanjutan ruang laut ini menunjukkan bahwa program tidak hanya mengejar peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan ekologis dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

“Adanya rumpon yang dipasang ini betul-betul membantu kami selaku nelayan, apalagi pada musim yang ikan susah dicari, jenis ikan yang biasa dapat katombong sama ikan merah” (Wawancara dengan KR Pada hari Minggu 11 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu nelayan, diketahui bahwa keberadaan rumpon yang dipasang di wilayah tangkap mereka memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan hasil tangkapan, terutama pada musim-musim tertentu saat ikan sulit ditemukan. Nelayan merasa sangat terbantu dengan adanya rumpon karena memudahkan mereka dalam menemukan titik kumpul ikan sehingga proses penangkapan menjadi lebih efektif. Adapun Kritikan yang disampaikan oleh nelayan mengatakan bahwa :

“Kalau mau mendapatkan tangkapan yang bagus seharusnya rumpon itu bisa dipasang di kedalaman 50 M- 70 M, tapi susah karena terbatas anggarannya apalagi itu talinya rumpon yang disediakan, kalau kita nelayan yang mau beli sangat susah” (Wawancara bersama AF pada hari Rabu 21 Mei 2025)

Efektivitas juga dipengaruhi oleh faktor teknis terkait kedalaman dan lokasi pemasangan rumpon agar dapat memberikan hasil tangkapan yang optimal bagi nelayan. Salah satu informan dari kalangan nelayan menyampaikan bahwa pemasangan rumpon idealnya dilakukan pada kedalaman 50 hingga 70 meter agar dapat menarik ikan dalam jumlah yang lebih banyak dan beragam. Namun, upaya ini sering terkendala oleh keterbatasan anggaran, terutama dalam penyediaan tali rumpon yang memiliki panjang dan kekuatan sesuai kebutuhan pemasangan di laut dalam. Hal ini membuat nelayan sulit untuk melakukan pengadaan secara mandiri, sehingga pemasangan rumpon belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan untuk meningkatkan hasil tangkapan secara maksimal

Tabel 4 2 Data Hasil Tangkapan Rumpon

NO	JENIS IKAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	
1	TUNA	8.291	8.482	9.502	10.027,3	12.881,1	11.866,7
2	CAKALANG	4.692	4.800	3.542	4.811,8	5.706,8	4.129,6
3	TONGKOL	10.942	11.193	4.844	5.144,8	15.851,7	13.411,1
4	LAYANG	1.768	1.809	5.986	6.398,8	9.715,2	7.934,9
5	KEMBUNG	1.294	1.324	2.630	2.935,0	1.699,0	2.224,6
6	TEMBANG	1.076	1.100	1.297	1.239,9	113,1	1.778,5
7	LEMURU	522	534	1.926	1.428,6	1,4	0,0
8	KERAPU	2.427	2.483	2.694	2.690,7	1.373,3	1.993,4
9	TERI	219	224	0	247,1	96,8	414,7
10	PAPERREK	530	542	0		15,1	15,5
11	KAKAP	1.492	1.526	5.529	2.128,0	2.222,1	3.527,0
12	IKAN LAINNYA	19.398	19.843	15.880	18.470,6	5.936,4	11.669,3
JUMLAH		52.651,6	53.860,1	53.830,3	55.522,6	55.612,0	58.965,3

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, dapat dilihat adanya peningkatan produksi setiap tahunnya setelah pelaksanaan program 1000 rumpon sejak 2020 hingga 2024. Sebelum adanya program ini, produksi perikanan cenderung stabil namun belum menunjukkan peningkatan signifikan, sedangkan setelah program rumpon berjalan, produksi menunjukkan dampak positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran rumpon sebagai salah satu instrumen pengelolaan sumber daya kelautan mampu meningkatkan efektivitas usaha tangkap nelayan dengan memberikan kemudahan dalam menemukan spot penangkapan ikan.

g. Efisiensi

Efisiensi dilihat dari bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal, sehingga pengadaan dan pemasangan rumpon dapat menjangkau lebih banyak wilayah tangkap nelayan dengan

biaya yang tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Dalam konteks ini, efisiensi tidak hanya berarti penghematan biaya, tetapi juga penggunaan anggaran secara terukur dan akuntabel agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh nelayan tanpa terjadi pemborosan sumber daya.

“Untuk anggaran yang kita gunakan itu dari anggaran pokok (APBD), apalagi ini program prioritas terkhusus disektor perikanan dan biasanya ada bantuan dari provinsi baik berupa kapal dan semacamnya” (Wawancara bersama KK, pada hari Rabu 14 Mei 2025)

Dalam mendukung pelaksanaan Program 1000 Rumpon, Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba memanfaatkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai anggaran pokok dalam pembiayaan program ini. Hal ini selaras dengan status program rumpon sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah, khususnya di sektor perikanan, sehingga alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana penangkapan ikan yang lebih efektif. Selain itu, dalam pelaksanaannya, program ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi, baik dalam bentuk bantuan kapal maupun sarana pendukung lainnya. Efisiensi juga diukur dan dipahami sebagai kemampuan program dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan tetap mempertimbangkan penghematan waktu, tenaga, dan biaya, baik dari aspek pemerintah sebagai penyelenggara program maupun nelayan

sebagai penerima manfaat. Hal ini disampaikan oleh nelayan yang mengatakan bahwa

“Kemarin teman-teman pergi di rumpon allhamdulillah dapatji ikan dan lumayan untuk dijual” (Wawancara bersama nelayan AF, pada Rabu 21 Mei 2025)

“Singkat sekali ji sebenarnya waktu kalau dirumpon orang menangkap ikan biasa pergika jam 10 pulang itu sekitaran jam 3 sore, beda kalau saya tidak menangkap di rumpon atau pergi melaut lepas biasa berharu-harika di laut” (wawancara bersama AF, pada Rabu 21 Mei 2025)

Informan menyampaikan bahwa rumpon memudahkan mereka memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah yang layak dan dalam waktu yang lebih singkat. Salah seorang nelayan mengungkapkan bahwa hasil tangkapan dari rumpon cukup untuk dijual dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, aktivitas melaut yang biasanya memakan waktu sehari-hari kini hanya berlangsung sekitar lima hingga enam jam, karena ikan sudah terkonsentrasi di sekitar rumpon yang dipasang tidak jauh dari wilayah tangkap nelayan. Temuan ini menunjukkan bahwa program 1000 rumpon telah berkontribusi secara langsung terhadap penghematan waktu, bahan bakar, serta tenaga kerja nelayan. Dengan demikian, rumpon tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga strategi praktis dalam meningkatkan produktivitas dan mengefisienkan pola kerja nelayan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam penerapan program rumpon mengatakan bahwa

“Termasuk yang kita hadapi ini ada pada penganggaran, apalagi tahun inikan tahun efisiensi anggaran teman-teman nelayan masih banyak yang mengajukan permintaan bantuan itu, karena untuk tahun 2025 belum maksimal, karena tahun-tahun sebelumnya kita mampu sebar 150-200 unit rumpon kepada nelayan (Wawancara bersama KK Rabu 14 Mei 2025)

Informan menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba yang menghadapi kendala dalam penganggaran. Kebijakan efisiensi yang berlaku menyebabkan penyaluran anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi mengalami keterlambatan. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya distribusi rumpon kepada kelompok nelayan, meskipun permintaan terus meningkat. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian program pada 2025 belum maksimal karena keterbatasan dukungan anggaran.

h. **Responsivitas**

Responsivitas merupakan salah satu prinsip *Good Governance* yang mengukur kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam penelitian ini, responsivitas menjadi indikator untuk melihat bagaimana Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan program 1000 rumpon mampu menanggapi kebutuhan nelayan terkait sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan kendala yang mereka hadapi di lapangan. Indikator ini menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola *blue economy* dengan tujuan peningkatan hasil tangkapan

nelayan, penghematan biaya operasional, dan keberlanjutan sumber daya laut.

“Kami selalu menerima informasi dari nelayan apa yang menjadi kebutuhannya baik informasi dari online maupun datang langsung dikantor, biasanya ada nelayan cuma menghubungi via online semisal daerah yang jauh ke kantor”(Wawancara Bersama KK pada hari Rabu 14 Mei 2025

Informan menjelaskan bahwa pihak dinas secara terbuka menerima berbagai masukan dan informasi mengenai kebutuhan nelayan, termasuk permintaan atau kendala yang mereka sampaikan. Hal ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara online, terutama bagi nelayan yang berada di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan akses untuk datang langsung ke kantor,serta melalui kunjungan langsung bagi nelayan yang memiliki kesempatan untuk hadir secara fisik. Praktik ini menunjukkan adanya upaya dinas dalam menyesuaikan mekanisme pelayanan dengan kondisi nelayan di lapangan, sehingga kebutuhan mereka tetap dapat terakomodasi dengan cepat dan tepat.

“Itu nelayan biasa protes terkait lokasi penempatan,tapi kami sampaikan bahwa aturan penempatan sudah jelas agar hal-hal yang menjadi masalah nantinya itu bisa kita koordinir,nah ini juga kita sampaikan kalau untuk sekarang kita tidak menggunakan rumpon dalam karena bisa merusak,bisa jadi nelayan melakukan overfishing.(Wawancara bersama YS pada hari Jumat 9 Mei 2025)

Informan menjelaskan bahwa nelayan kerap mengeluhkan titik penempatan rumpon yang dinilai belum sesuai dengan keinginan

mereka. Menanggapi hal ini, pihak dinas secara terbuka memberikan penjelasan bahwa penempatan rumpon telah memiliki ketentuan yang jelas untuk mencegah potensi permasalahan di kemudian hari serta memastikan pengelolaan yang terkoordinasi. Selain itu, dinas juga memberikan pemahaman kepada nelayan terkait kebijakan untuk tidak menggunakan rumpon dalam, mengingat potensi kerusakan ekosistem laut yang dapat terjadi dan risiko terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*). Hal ini menunjukkan adanya upaya dari dinas untuk tetap mendengar aspirasi nelayan sambil memberikan edukasi mengenai pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.

i. **Visi Strategis**

visi strategis dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah memiliki arah dan rencana jangka panjang yang mendukung keberlanjutan program 1000 rumpon, sekaligus merespons permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan secara cepat dan tepat. Visi strategis yang dimaksud tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap keberhasilan program secara administratif, tetapi juga terhadap tercapainya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan *blue economy*. Dengan demikian, visi strategis tidak hanya menjadi kerangka perencanaan, tetapi juga alat transformasi menuju pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Untuk memperkuat analisis

mengenai bagaimana visi strategis ini dijalankan dalam praktik, beberapa wawancara dari informan yang menggambarkan arah kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program rumpon berbasis *blue economy*.

“latar belakang program ini sebenarnya langsung dari pak bupati melalui dinas perikanan, sebagai salah satu program yang berfokus bagaimana meningkatkan taraf hidup khususnya daerah pesisir Bulukumba (Wawancara dengan KK, pada hari Rabu 14 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, diketahui bahwa latar belakang pelaksanaan program 1000 rumpon di wilayah ini berangkat dari inisiatif langsung Bupati Bulukumba. Melalui koordinasi dengan Dinas Perikanan, program ini dirancang sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi kelompok nelayan yang berada di wilayah pesisir Bulukumba.

Program ini menjadi sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir sesuai dengan konsep *blue economy*, karena bertujuan memperkuat pendapatan dan kemandirian ekonomi nelayan melalui akses terhadap sarana penangkapan ikan, sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terangkat secara perlahan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi laut.

“selaku kepala dinas perikanan tentu arah dan harapan dari program ini itu bisa jadi tulang punggung atau penopang hidup bagi nelayan selain inovasi yang kita butuhkan adanya kebulatan tekad baik dari pemerintah maupun teman-teman

nelayan, (Wawancara dengan KK, pada hari Rabu 14 Mei 2025)

“kita berharap nelayan bisa lebih mandiri karena mereka sudah diarahkan dengan prosedur yang ada. Jadi tidak hanya fokus pada bantuan alat yang diberikan tapi juga melihat masyarakat bisa memanfaatkannya dalam jangka panjang (Wawancara dengan KK, pada hari Rabu 14 Mei 2025)

Menurut informan fondasi utama untuk mengarahkan visi dari program ini adalah kebulatan tekad antara pemerintah dan masyarakat untuk selalu menciptakan inovasi yang bermanfaat. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam pelaksanaan program, yang mendukung pencapaian *blue economy*. Visi ini menunjukkan bahwa program tidak hanya dirancang sebagai respons terhadap masalah sesaat, Menurut informan untuk menilai jangka panjang dari program ini maka pemerintah mendorong kemandirian nelayan melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan fisik seperti rumpon, tetapi juga melalui pembinaan dan pengarahan yang terstruktur. Harapan agar masyarakat mampu memanfaatkan bantuan tersebut secara berkelanjutan menunjukkan adanya upaya untuk membangun kapasitas ekonomi masyarakat pesisir dalam jangka panjang,

Adapun pernyataan pendukung dari kepala bagian tangkap dinas perikanan Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa

“ Inovasi rumpon benar menjadi solusi bagi masyarakat karena metode ini ramah lingkungan, nelayan cukup siapkan itu pelepah daun kelapa untuk jadi sarangnya ikan. (Wawancara bersama YS pada hari Jumat 9 Mei 2025)

Pernyataan tersebut merefleksikan bahwa inovasi rumpon dipandang sebagai pendekatan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya laut, mengingat metode yang digunakan bersifat sederhana dan berbasis lingkungan. Pemanfaatan material alami seperti pelepah daun kelapa sebagai media pengumpul ikan mencerminkan strategi ramah lingkungan yang tidak menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keberlanjutan ekosistem dalam kerangka *blue economy*. Selain itu, kemudahan dalam proses pembuatan rumpon menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam serta penerapan kearifan lokal masyarakat pesisir, yang secara keseluruhan mendukung implementasi tata kelola yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

C. Pembahasan Tentang Tata Kelola Blue economy Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Studi Kasus Program 1000 rumpon Di Kabupaten Bulukumba

Penelitian ini membahas bagaimana praktik tata kelola Blue Economy diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya kelautan melalui pelaksanaan program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba. Temuan di lapangan menunjukkan adanya langkah nyata dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) ke dalam proses pelaksanaan program. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Perikanan dan kelompok nelayan penerima manfaat, terlihat bahwa inisiatif ini tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan nelayan, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosial serta perlindungan lingkungan, sebagaimana

yang ditekankan dalam pendekatan *blue economy*. Program 1000 Rumpon ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan kelautan yang berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada optimalisasi penggunaan sumber daya alam, penguatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pesisir, serta pelestarian ekosistem laut. Dalam hal ini, *blue economy* tidak hanya berfungsi sebagai acuan teoritis, tetapi juga menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan kebijakan, guna memastikan bahwa pengembangan sektor kelautan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip *good governance* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 menjadi landasan teoritis penting dalam menilai kualitas implementasi program ini. Prinsip yang dijadikan indikator dalam penelitian ini mencakup transparansi, partisipasi, kesetaraan, penegakan hukum, efektivitas, efisiensi, responsivitas serta visi strategis. Dalam penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut telah berjalan secara bertahap dan cukup terarah menuju konsep *blue economy*, prinsip ini memberikan kerangka analitis yang memadai untuk mengkaji sejauh mana tata kelola program 1000 rumpon mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara adil dan merata

1. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam teori *good governance* yang ditekankan oleh UNDP, yaitu keterbukaan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta

pengelolaan sumber daya publik. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Transparansi juga merupakan fondasi dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dengan keterbukaan informasi, seluruh pemangku kepentingan, terutama nelayan sebagai pengguna utama laut, dapat mengetahui secara pasti mengenai rencana penggunaan ruang laut, alokasi bantuan, hingga aturan teknis dalam pemasangan rumpon. Ketersediaan informasi yang jelas mendorong masyarakat pesisir untuk memahami batasan dan potensi wilayah lautnya, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran dalam menjaga ekosistem laut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba telah menerapkan prinsip transparansi melalui kegiatan sosialisasi kepada kelompok nelayan sebelum penyaluran bantuan, penyuluhan teknis secara berkala, dan publikasi informasi melalui media digital Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintahan terbuka, di mana proses pelaksanaan program tidak bersifat tertutup, tetapi memberi ruang akses informasi kepada masyarakat. Meski demikian, masih diperlukan optimalisasi dalam keterbukaan data penerima manfaat agar masyarakat dapat memantau pemerataan distribusi bantuan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan setiap pemangku kepentingan, khususnya aturan pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan yang diambil, baik kepada publik maupun lembaga pengawas. Akuntabilitas juga merupakan cerminan langsung dari pengelolaan sumber daya laut yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan sumber daya kelautan, akuntabilitas tidak hanya berarti menyusun laporan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa pengambilan keputusan dalam pemanfaatan laut telah melalui prosedur yang transparan, berbasis data, dan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Hal ini sangat penting untuk menghindari eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali dan merusak habitat alami.

Berdasarkan hasil penelitian, program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba menunjukkan adanya praktik akuntabilitas yang cukup baik. Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dalam melaksanakan pelaporan berkala mengenai progres distribusi rumpon dan mengevaluasi bagaimana dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas publik masih perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat agar jalannya program tetap pada koridor yang benar dan sesuai tujuan *blue economy*.

Akuntabilitas dalam tata kelola program tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi ketika pertanggungjawaban berjalan efektif, maka konsep *blue economy* dapat lebih mudah diterapkan dan dapat menjamin pengelolaan sumber daya laut yang bertanggung jawab.

3. Partisipasi

Partisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Menurut UNDP (1997), partisipasi mencerminkan hak setiap warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sah. Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan berbasis *blue economy*, partisipasi masyarakat pesisir bukan hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal. Dalam pelaksanaan program 1000 rumpon Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba telah menunjukkan keterlibatan aktif nelayan dalam beberapa tahapan pelaksanaan program, khususnya melalui proses identifikasi kebutuhan, pendampingan teknis, serta bimbingan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebelum distribusi rumpon dilakukan, pihak dinas terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari nelayan mengenai jenis bantuan yang dibutuhkan. Setelah itu, pendampingan dilakukan langsung oleh tim teknis untuk memastikan bahwa rumpon dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan model partisipasi kolaboratif, di mana relasi antara pemerintah dan masyarakat bersifat dua arah. Partisipasi yang efektif mencakup bukan hanya keterlibatan fisik, melainkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

4. Kesenjangan

Kesenjangan dalam konsep *good governance* menurut UNDP (1997), yang menekankan pentingnya pemberian kesempatan yang adil dan merata bagi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, serta pemanfaatan sumber daya publik. Prinsip ini menuntut agar tidak ada kelompok atau individu yang terpinggirkan, terutama mereka yang secara historis kurang diuntungkan atau memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya. Kesenjangan dalam konteks ini tidak hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga keberpihakan kepada kelompok rentan agar mereka mendapatkan porsi yang adil sesuai kebutuhan dan peran mereka dalam pembangunan. Praktik ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan tidak bersifat eksklusif, melainkan terbuka bagi seluruh masyarakat pesisir yang membutuhkan, sehingga memperkuat nilai keadilan dalam distribusi manfaat. prinsip kesetaraan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendekatan keberlanjutan, karena pembangunan sektor kelautan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi semata, melainkan juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir secara merata dan inklusif. Oleh karena itu, tata kelola sumber daya laut yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dapat dipandang sebagai upaya strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, pelestarian ekosistem, dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dalam jangka panjang

Dalam pelaksanaan program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba, terlihat adanya upaya sistem kekeluargaan yang dimiliki nelayan terhadap

pemanfaatan rumpon, melihat aktivitas nelayan yang memberikan kesempatan untuk saling menikmati hasil dari program ini walaupun secara administrasi masyarakat tidak tergolong dalam kelompok penerima. Pemerintah daerah dinas perikanan Kab. Bulukumba terus mengupayakan untuk melakukan distribusi rumpon secara merata dengan memperhatikan wilayah dan kelompok nelayan yang benar-benar memerlukan bantuan. Prinsip kesetaraan dalam program ini menjadi cerminan penting dalam proses tata kelola *blue economy*, bahwa pembangunan sektor kelautan tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada aspek pemberdayaan masyarakat secara merata dan adil.

5. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang urgen dalam mewujudkan tata kelola yang baik, terutama dalam pengelolaan sumber daya laut. Dalam prinsip *good governance*, UNDP (1997) menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, tidak diskriminatif, dan konsisten, guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan berbasis *blue economy*, penegakan hukum berperan penting dalam mencegah eksploitasi berlebihan, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan keadilan distribusi akses terhadap sumber daya laut. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa pelaksanaan program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba masih menghadapi tantangan khususnya terkait regulasi teknis penggunaan rumpon yang belum diatur secara rinci di tingkat daerah.

Meskipun pihak dinas secara langsung menyampaikan kepada nelayan terkait aturan penggunaan seperti yang disampaikan ketika pendistribusian rumpon. Secara nasional telah ada Peraturan Menteri KKP Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tata letak dan ketentuan teknis pemasangan rumpon aturan tersebut untuk menindak praktik ilegal seperti penempatan rumpon yang tidak sesuai titik koordinat. Keterlibatan badan pengawas terhadap program seperti pihak dari lembaga masyarakat (LSM) yang seharusnya menjadi mitra dalam mengawal program ini sangat dibutuhkan namun hal demikian menjadi kendala dalam penerapan program rumpon di Bulukumba.

6. Efektivitas

Efektivitas dalam konsep *good governance* yang dikembangkan oleh UNDP (1997), yang mengacu pada sejauh mana kebijakan, program, dan pelayanan publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Prinsip ini menekankan pentingnya kinerja pemerintahan yang mampu menghasilkan output dan outcome yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara tepat waktu dan berdaya guna. efektivitas pengelolaan sumber daya kelautan juga ditandai dengan kemampuan suatu program atau kebijakan untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi lingkungan. Program yang efektif harus mampu mendorong aktivitas ekonomi kelautan yang produktif tanpa merusak habitat laut, serta memastikan bahwa hasil pengelolaan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas menjadi indikator kunci dalam

menilai keberhasilan tata kelola kelautan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kesinambungan sumber daya dan kemandirian masyarakat pesisir dalam jangka panjang.

Pada pelaksanaan program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba, efektivitas dapat dilihat dari peningkatan hasil tangkapan ikan oleh nelayan penerima bantuan. Adanya rumpon membantu nelayan dalam menentukan lokasi penangkapan secara lebih pasti sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga selama proses melaut. Selain itu, adanya program ini juga memberikan dampak positif pada pengurangan biaya operasional para nelayan. Dengan lokasi penangkapan yang lebih dekat dan hasil tangkapan yang lebih optimal, nelayan tidak perlu lagi menghabiskan banyak bahan bakar dan biaya untuk melaut ke wilayah yang jauh. Hal ini menunjukkan bahwa program 1000 rumpon tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan hasil produksi perikanan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi dalam kegiatan penangkapan ikan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sejalan dengan prinsip *blue economy* yang mengedepankan keberlanjutan, dengan menitikberatkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir tanpa mengesampingkan pelestarian sumber daya kelautan. Dengan demikian, program ini dapat dinilai berhasil secara efektif karena mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penghasilan nelayan, sekaligus mendorong upaya pelestarian ekosistem laut melalui pengelolaan sumber daya yang lebih

sistematis dan bertanggung jawab.

7. Efisiensi

Efisiensi dalam kerangka teori *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (1997), yang mengacu pada kemampuan lembaga publik dalam menggunakan sumber daya yang tersedia baik anggaran, waktu, maupun tenaga secara optimal untuk mencapai tujuan kebijakan. Prinsip efisiensi menuntut agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memperhatikan proses pelaksanaannya agar tidak terjadi pemborosan sumber daya. Dalam konteks ini, lembaga pemerintahan dituntut untuk mengelola seluruh tahapan program secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat biaya, agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sasaran.

Dalam pengelolaan sumber daya kelautan efisiensi berfungsi sebagai tolok ukur terhadap sejauh mana suatu program mampu memanfaatkan potensi laut secara optimal tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan maupun pemborosan sumber daya. Dalam pelaksanaan program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba, prinsip efisiensi terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran yang tepat, melakukan distribusi rumpon secara proporsional, serta melibatkan komunitas nelayan dalam pelaksanaan program secara efektif tanpa mengorbankan kualitas maupun ketepatan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah berupaya berada proses efisiensi dengan mendistribusikan rumpon secara bertahap sesuai kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah. Penggunaan sumber daya baik waktu, tenaga, dana sudah tercermin dalam program ini sehingga efektivitas dari program ini sudah mengarah sebagai tata kelola yang baik. Namun keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan dalam mewujudkan efisiensi secara optimal pada program ini, karena target distribusi rumpon belum dapat tercapai sepenuhnya dalam periode pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam tata kelola *blue economy* tidak hanya bergantung pada implementasi teknis di lapangan, tetapi juga pada dukungan kebijakan anggaran yang berkelanjutan untuk memastikan program berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

8. Responsivitas

Responsivitas merupakan prinsip penting dalam teori *governance* menurut UNDP (1997), yang menekankan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan sesuai kondisi di lapangan. Dalam pengelolaan sumber daya kelautan, responsivitas tercermin dari bagaimana pemerintah mampu menyesuaikan kebijakan dan program sesuai dengan dinamika di lapangan, seperti kondisi sosial-ekonomi nelayan, perubahan musim, maupun tantangan ekosistem laut. Responsivitas dalam konsep *blue economy* menjadi penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan mampu menyesuaikan diri dengan aspirasi dan kondisi masyarakat penerima manfaat, khususnya nelayan sebagai aktor utama

pengelolaan sumber daya kelautan. Pemerintah daerah diharapkan dapat merespons kebutuhan masyarakat pesisir secara adaptif, misalnya dalam hal distribusi bantuan rumpon, pembinaan nelayan, maupun pengawasan wilayah tangkap. Dengan demikian, responsivitas tidak hanya menjadi ukuran kecepatan tindakan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya laut.

Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba menunjukkan tingkat responsivitas yang baik dalam pelaksanaan program 1000 rumpon. Hal ini terlihat dari upaya dinas yang secara aktif mendengar keluhan nelayan terkait penempatan rumpon, perbaikan teknis, serta kebutuhan pendampingan dalam pemeliharaan rumpon. Bentuk respons ini mencerminkan adanya mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang sesuai dengan prinsip *governance* dalam membangun keterbukaan jalur komunikasi dan kesiapan pemerintah dalam menindaklanjuti masukan masyarakat.

9. Visi Strategis

Visi strategis dalam prinsip *good governance* yang meskipun tidak secara eksplisit dirumuskan oleh UNDP, namun secara implisit terkait erat dengan prinsip efektivitas dan orientasi jangka panjang. Pemerintahan yang baik dituntut untuk memiliki visi yang jelas, terarah, dan berkelanjutan agar program-program pembangunan mampu menjawab tantangan masa depan dan menjamin kelestarian sumber daya. visi strategis menjadi landasan penting bagi keberlangsungan ekosistem dan ekonomi pesisir. Visi strategis tidak

hanya sekadar merancang tujuan jangka panjang, tetapi juga mencerminkan pemahaman holistik atas interaksi antara manusia dan lingkungan laut. Dengan adanya visi yang terencana dan konsisten, maka kebijakan kelautan seperti program 1000 rumpon tidak bersifat reaktif, melainkan preventif dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah menunjukkan arah visi strategis melalui kebijakan pembangunan sektor perikanan tangkap yang berorientasi pada peningkatan taraf kesejahteraan nelayan dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Program 1000 rumpon tidak hanya diposisikan sebagai intervensi ekonomi jangka pendek, melainkan sebagai instrumen transformasi sistem perikanan menjadi lebih ramah lingkungan, efisien, dan berbasis komunitas. Visi ini terwujud melalui dukungan terhadap inovasi alat tangkap, pelatihan teknis, serta upaya penguatan kelembagaan kelompok nelayan. Oleh karena itu, visi strategis yang dimiliki oleh pemerintah daerah mencerminkan keseriusan dalam menjadikan laut sebagai sumber daya strategis yang tidak hanya dieksploitasi, tetapi juga dilindungi dan dikelola secara bijak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transparansi dalam Program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba telah berjalan cukup baik melalui penyebaran informasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan kepada kelompok nelayan, baik melalui penyuluhan langsung maupun pemanfaatan media daring. Transparansi ini memungkinkan nelayan memperoleh informasi mengenai prosedur pengajuan bantuan, teknis pemasangan, serta manfaat program secara jelas sehingga masyarakat memiliki akses terhadap proses dan perkembangan pelaksanaan program. Keterbukaan informasi ini menjadi dasar untuk memperkuat tata kelola *blue economy* karena menjamin kepercayaan publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program
2. Pelaksanaan akuntabilitas pada Program 1000 rumpon diwujudkan melalui proses verifikasi kebutuhan kelompok nelayan secara sistematis sebelum pendistribusian bantuan dilakukan. Akuntabilitas ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan anggaran publik, tetapi juga sebagai sarana evaluasi agar program tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan keterpaduan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pengelolaan sumber daya kelautan, selaras dengan prinsip *blue economy* yang menekankan keberlanjutan
3. Indikator partisipasi tercermin dari keterlibatan masyarakat nelayan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, yang diwadahi melalui pendampingan teknis dan komunikasi aktif antara dinas dan kelompok nelayan

penerima manfaat. Partisipasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial karena masyarakat dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan serta pengelolaan dan pemeliharaan rumpon. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemberdayaan nelayan agar mampu mengelola bantuan secara mandiri dan optimal, sesuai prinsip *good governance* dalam tata kelola *blue economy*

4. Penegakan hukum dalam program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan belum adanya regulasi khusus di tingkat daerah mengenai teknis pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Meskipun pelaksanaan program merujuk pada peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tiadanya badan pengawasan eksternal yang tidak terlibat secara langsung dalam program ini, hal ini tentunya sangat diperlukan agar kondisi lapangan selalu terpantau dan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengevaluasi program rumpon di Bulukumba
5. Efektivitas program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba sudah mencapai tujuan tata kelola dalam model *blue economy* dapat dilihat dari kontribusi program dalam mempermudah nelayan memperoleh hasil tangkapan secara lebih cepat dan optimal dengan lokasi penangkapan yang lebih dekat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan tetap pada kondisi dimana nelayan menjaga kondisi sumber daya laut yang ada.

6. Efisiensi terlihat dari pemanfaatan dana publik secara optimal dalam mendukung distribusi rumpon, pemeliharaan, serta pendampingan teknis kepada nelayan, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dengan biaya yang terukur. Program ini membantu nelayan mengurangi biaya bahan bakar dan waktu melaut, sejalan dengan prinsip efisiensi dalam *governance*. Namun keterbatasan alokasi anggaran masih menjadi tantangan dalam pemerataan distribusi rumpon, sehingga kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi penting dalam mewujudkan tata kelola kelautan yang efisien dan berkelanjutan
7. kesetaraan dalam program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendistribusikan sarana bantu penangkapan ikan secara adil kepada kelompok nelayan yang membutuhkan. Hal ini terlihat dari keterbukaan akses bagi seluruh nelayan untuk mengajukan permohonan bantuan sesuai kebutuhan mereka, serta tidak adanya diskriminasi dalam proses pengajuan bantuan selama prosedur terpenuhi.
8. Responsivitas dalam program 1000 rumpon di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa Dinas Perikanan telah berupaya merespons kebutuhan masyarakat nelayan secara cepat dan tepat. Hal ini tercermin dari adanya mekanisme komunikasi dua arah melalui jalur online dan tatap muka yang memfasilitasi penyampaian keluhan, masukan, serta permintaan dari nelayan terkait penempatan dan pemeliharaan rumpon. Pihak dinas juga menunjukkan keterbukaan dalam memberikan penjelasan terkait kebijakan teknis penempatan

rumpon untuk mencegah kerusakan ekosistem dan praktik overfishing, sambil tetap mengakomodasi aspirasi nelayan sesuai kondisi lapangan. Hal ini menegaskan bahwa responsivitas tidak hanya diukur dari kecepatan penanganan aduan, tetapi juga dari ketepatan dalam memberikan solusi yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan berbasis *blue economy*

9. Visi strategis dalam pengelolaan program 1000 rumpon merepresentasikan urgensi perumusan kebijakan jangka panjang yang sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan penguatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menunjukkan bahwa perencanaan yang visioner dan sistematis mampu mendorong terciptanya kemandirian nelayan sekaligus menjamin pengelolaan sumber daya laut yang arif dan berkesinambungan. Sinergi antara orientasi strategis, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta pendekatan *blue economy* menghasilkan model tata kelola kelautan yang tidak semata-mata bersifat responsif terhadap kebutuhan sesaat, melainkan juga proaktif dalam mengantisipasi dinamika masa depan, terutama dalam menjaga keseimbangan ekologis dan pembangunan ekonomi kelautan yang inklusif.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Perikanan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pendistribusian, hingga evaluasi dampak

program rumpon. Penyusunan regulasi teknis yang lebih rinci mengenai tata cara penggunaan rumpon, lokasi pemasangan, serta pengawasan berbasis data diperlukan guna mencegah terjadinya praktik eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme evaluasi berkala serta membentuk forum konsultatif yang melibatkan perwakilan nelayan sebagai bentuk pelibatan partisipatif dalam pengambilan keputusan.

2. Nelayan dan masyarakat pesisir

Kelompok nelayan sebagai penerima manfaat diharapkan dapat lebih aktif dalam menjaga dan memanfaatkan rumpon secara berkelanjutan. Kesadaran kolektif untuk menjaga ekosistem laut perlu ditanamkan melalui pengelolaan berbasis kelompok dan pembentukan aturan internal yang mendukung proses pengelolaan program. Kolaborasi antar nelayan dalam hal pemeliharaan rumpon dan berbagi manfaat secara adil merupakan langkah penting untuk menjaga solidaritas dan meningkatkan efektivitas program.

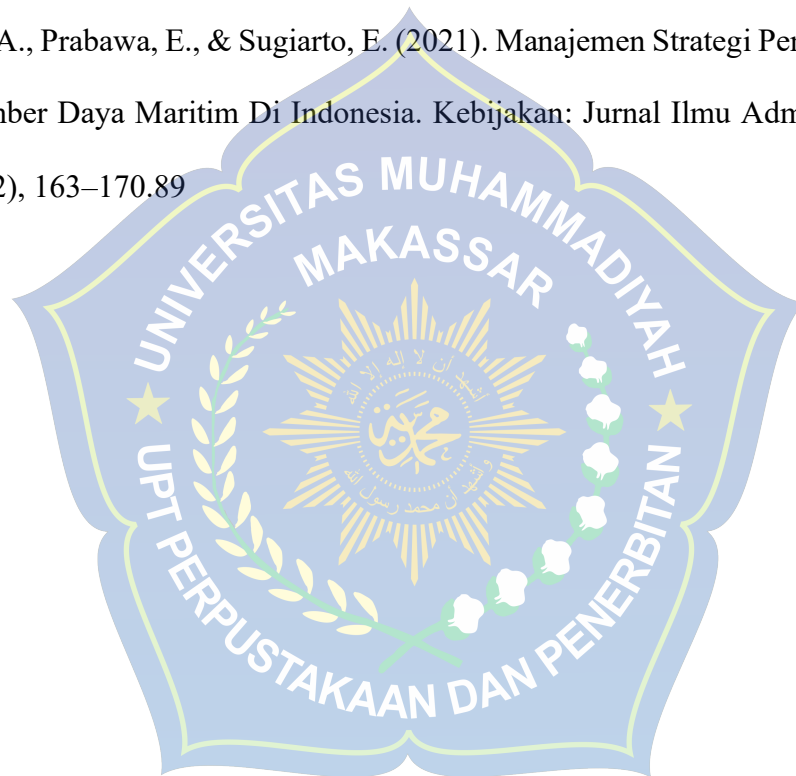
DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A. D. I., Hasana, S., & Assidiq, F. M. (2023). Implementasi Blue Economy Di Indonesia Dengan Memanfaatkan Teknologi Big Data. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 134–140.
- Bps. (N.D.). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. <https://Bulukumbakab.Bps.Go.Id/Id>
- Burhanuddin, A. I., & Nessa, N. (2018). *Pengantar Ilmu Kelautan Dan Perikanan*. Deepublish.
- Dpm-Ptsp Provinsi Sulawesi Selatan. (N.D.). Profil Kabupaten Bulukumba. <https://Dpmpptsp.Sulselprov.Go.Id/Welcome>
- Hakim, M. F. (2013). Blue Economy Daerah Pesisir Berbasis Kelautan Dan Perikanan. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 1–7.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11.
- Hariadi, A., Han, M., Tni, L. M., Perseorangan, K. K. I., & Ri, L. K. N. (2023). *Reformasi Pengelolaan Aset Laut Dan Pesisir Guna Mewujudkan Ekonomi Biru*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Ri.
- Ilma, A. F. N. (2014). Blue Economy: Kesimbangan Perspektif Ekonomi Dan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 14(1).
- Jayanti, N. W. D. B. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Public Governance Di Indonesia. *Journal Of Contemporary Public Administration (Jcpa)*, 3(2), 51– 58.

- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–7.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1).87
- Mudjiyanti, R., Maichal, M., Boari, Y., & Laksono, R. D. (2024). Sustainable Economic Development: Teori Dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor Di Indonesia. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nasution, M. (2022). Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2).
- Nengsih, N. S. (2020). Penerapan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Di Daerah Pesisir Dalam Keanekaragaman Hayati Laut Untuk Mensejahterakan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 151–162.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal Education And Government Wiyata*, 1(1), 40–52.
- Putra, M. N. K., & Asri, M. F. (2023). Juridical Review Of Blue Economy In Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 3(1), 123–156.
- Rifai, R., & Haeril, H. (2024). Integrasi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Pesisir Di Kabupaten Bima. *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp)*, 6(1), 25–36.

- Rostiawati, E. (2020). Efektifitas Manajemen Kepemimpinan Dalam Menciptkan Good Governance. *Al- Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 59– 69.
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir. *Sosio Informa*, 3(3).
- Sari, D. N., Previdayana, K. S., & Djasuli, M. (2022). Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (Jebs)*, 2(3), 911–915.
- Shiddiq, M. F. R. (2018). Analisis Kelayakan Usaha Perikanan Nelayan Pancing Ulur Kapal Jukung Dengan Rumpon Dan Tanpa Rumpon Di Pondokdadap.
- Siburian, R. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Laut Dan Hutan: Perspektif, Kebijakan, Dan Aksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1–228.
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik: Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif Dan Akuntabel. Ipdn Press.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
- Sultan, D., & Ramadhan, M. F. (2024). Peran Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Sumber Daya Laut Indonesia. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 88 34–40.

- Sumantri, I. (2022). Reorientasi Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Sektor Publik Di Indonesia. Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 5(2), 63–72.
- Suryanti, S., Supriharyono, S., & Anggoro, S. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Warnida, W. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Rewata'a. Universitas Sulawesi Barat.
- Wibowo, A., Prabawa, E., & Sugiarto, E. (2021). Manajemen Strategi Pengelolaan Sumber Daya Maritim Di Indonesia. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 12(2), 163–170.89



LAMPIRAN

A. Gambar realisasi rumpon data 2023-2024

Gambar realisasi rumpon tahun 2023

NO	NAMA KELOMPOK PENERIMA	NAMA KETUA KELOMPOK	N I K	BANYAKNYA	ALAMAT (KEL/DESA, KEC)	NO. REGISTRASI	KET
1	KAMPUNG BERU SATU	H. ALI IMRAN	7302030505660003	6	TANAH LEMO, BONTOLAHARI	73/02/DP/0023/2017	DAU
2	KURNIA	H. MUH. JUDAR	7302063112640016	6	TANAH JAYA	73/02/KTPi/2894/2016	DAU
3	TITIPAN ILAHI	JAMALUDDIN	7302020405750001	6	BENTENGE, EKATIRO,	73/02/KTPi/3240/2016	DAU
4	PASSAMATURUKANG	BASRUN	73040909740001	6	BONTOTIRO	523/Klp/0009/DP/2021	DAU
5	CAHAYA RAHMAT	WAHYUDI	7302043112920021	6	EKA TIRO, BONTOTIRO	73/02/KTPi/3276/2016	DAU
6	ARYA RAHMAT	MANSUR	7302043112720074	6	EKA TIRO, BONTOTIRO	73/02/KTPi/3289/2016	DAU
7	AMAL PUTRA	SYAMSUL BAHRI	7302040504710001	6	EKA TIRO, BONTOTIRO	73/02/KTPi/3282/2016	DAU
8	ALAL JAYA	JALAL	7302040201760001	6	EKA TIRO, BONTOTIRO	523/Klp/0054/DP/2022	DAU
9	ERELEBU BERSINAR	SANGKA. M	7302043112690081	6	EKA TIRO, BONTOTIRO	73/02/KTPi/2783/2016	DAU
10	TIGA PUTRA	SAPARUDDIN	730205311265006	6	TANUNTUNG,	73/02/KTPi/2887/2016	DAU
11	HERO JAYA	PATIROI	7302051212750001	6	GUNTURU, HERLANG	73/02/KTPi/2885/2016	DAU
12	YULAN JAYA	ANDI MUH. RUSLI	7302052111760001	6	TANUNTUNG,	523/Klp/0067/DP/2021	DAU
13	WAHYU JAYA	MUH. RAMLI	7302050108790002	6	TANUNTUNG,	523/Klp/0008/DP/2020	DAU
14	KUB SAMATURU	BAHARUDDIN	7302052712760001	6	TANUNTUNG,	523/Klp/0007/DP/2020	DAU
15	SINAR ALAM YUSKA	RIZAL	7302050511870002	6	TANUNTUNG,	523/Klp/0065/DP/2022	DAU
16	CAHAYA BERKAH HERMANSYAH	HAMARING	7302053112570080	6	BONTOKAMASE, HERLANG	523/0054/DP/2018	DAU
17	MAU LAGI	ACO	7302053112590012	6	BONTOKAMASE,	73/02/KTPi/2874/2016	DAU
18	PUTRA SIBARA	UMAR	7302051203690002	6	BONTOKAMASE	523/Klp/0004/DP/2022	DAU
19	BERKAH JAYA	CAHIRUDDIN	7302051211740001	5	BONTOKAMASE	73/02/DP/0084/2017	DAU
20	CAMBAYA JAYA	ANDI MUH. SALEH	7302052509590002	5	BONTOKAMASE	523/Klp/0010/DP/2022	DAU
21	JIHAN T. PUTRI	MAPFILEWA	7302052010890001	5	BONTOKAMASE,	523/Klp/0019/DP/2019	DAU
JUMLAH				123			

Gambar realisasi rumpon tahun 2024

NO	NAMA KELOMPOK PENERIMA	NAMA KETUA KELOMPOK	N I K	BANYAKNYA	ALAMAT (KEL/DESA, KEC)	NO. REGISTRASI	KET
1	KUB BURUNG LAUT	MAHDUR	7302020107690040	41 PAKET	KASIMPURENG UJUNG BULU	73/02/KTP/2170/2014	ANGGARAN POKOK
2	HASIL MANDIRI	AHMAD AFFAN	7302092207840001	10	DANNUANG UJUNG LOE	523/Klp/0006/DP/2020	ANGGARAN POKOK
3	KUB HIDAYAT	KAROMA	7302092212570001	10	DANNUANG UJUNG LOE	73/02/KTP/2201/2014	ANGGARAN POKOK
4	KUB KAKAP MERAH	JASMAN	7302043112700107	21	EKATIRO BONTO TIRO	523/0003/DP/2018	ANGGARAN POKOK
5	GURITA BERSATU	HARDIANTO	7302030306830003	42	BIRA BONTO BAHARI	523/Klp/0185/DP/2023	ANGGARAN POKOK
6	SAMATURU	EDI ASWAR	7302032909900001	21	TANAH LEMO BONTO BAHARI	523/0043/DP/2018	ANGGARAN POKOK
7	ADHIL JAYA	EMIL	7302051505870001	5	TANUNTUNG HERLANG	523/Klp/0130/DP/2022	ANGGARAN POKOK
8	TIGA PUTRA 03	ABD. ASIS	7302050102730001	5	TANUNTUNG HERLANG	523/Klp/0190/DP/2023	ANGGARAN POKOK
9	LINDA BUANA	MUHAMMAD ASDAR	7302050102970001	5	TANUNTUNG HERLANG	523/Klp/0132/DP/2022	ANGGARAN POKOK
10	NIRFA INDAH	SUKARDI	7302050503750003	8	BONTOKAMASE HERLANG	523/0057/DP/2018	ANGGARAN POKOK
11	PAMMASE 02	ABD. RAHMAN	7302050112690001	7	BONTOKAMASE HERLANG	73/02/KTP/2125/2014	ANGGARAN POKOK
12	PUTRA TUNGGAL 01	ABD. ASIS	7302050107800008	5	BONTOKAMASE HERLANG	73/02/DP/0092/2017	ANGGARAN POKOK
13	CITRA TUNA	ANDI JUSMAN	7302052110680001	5	BONTOKAMASE HERLANG	523/Klp/0003/DP/2022	ANGGARAN POKOK
14	BINANGA EJAYYA	NIKO	7302063112800123	20	LAIKANG KAJANG	523/Klp/0024/DP/2021	ANGGARAN POKOK
15	BIRING EREA	MUH. NURSYAM	7302062510790002	5	TANAH JAYA KAJANG	523/Klp/0143/DP/2022	ANGGARAN POKOK
16	NUR HALIJA	H. MUH. ASRI	7302060912690004	5	TANAH JAYA KAJANG	523/Klp/0107/DP/2022	ANGGARAN POKOK
17	KUB MASAGENA	AKHMAD NABU, S.Sos	7302042805380001	15	EKA TIRO BONTO TIRO	523/Klp/0047/DP/2020	ANGGARAN POKOK
18	KMN WULANSARI	SUDIRMAN	7302043112520063	15	EKA TIRO BONTO TIRO	523/0067/DP/2018	ANGGARAN POKOK
19	LEMBANG KEKE	JUMBAR	7302060608670001	20	TANAH JAYA KAJANG	523/Klp/0174/DP/2023	ANGGARAN POKOK
20	SEJAHTERA BERSAMA	ZAINUDDIN	7302063112670119	40	TANAH JAYA KAJANG	73/02/KTP/2134/2014	ANGGARAN POKOK
21	KUB PULLENTENG	AMRULLAH BIN MUHIDDIN	7302041408700003	20	DWITIRO BONTO TIRO	523/Klp/0017/DP/2020	ANGGARAN POKOK
22	KUB MATTIROBULU	RISWANDI	7302052401910001	-	BONTOKAMASE HERLANG	73/02/KTP/3243/2016	ANGGARAN PERUBAHAN
23	KUB KASMAN JAYA	KASMAN	7302052404680002	-	BONTOKAMASE HERLANG	73/02/KTP/2873/2016	ANGGARAN PERUBAHAN
24	KUB LIMA TUJUH LIMA	H. ANDI MUH. ADIL	7302051505650003	-	BONTOKAMASE HERLANG	523/0083/DP/2018	ANGGARAN PERUBAHAN
25	KUB CAHAYA PURNAMA	SUMARDI	7302051804830002	-	BONTOKAMASE HERLANG	73/02/DP/0040/2017	ANGGARAN PERUBAHAN
JUMLAH				284			

B. Pengantar dan Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6742/05/C.4-VIII/IV/1446/2025

17 April 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

19 Syawal 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0380/FSP/A.5-VIII/IV/1446 H/2025 M tanggal 9 April 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI MUH. ISRA

No. Stambuk : 10564 11088521

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TATA KELOLA BLUE ECONOMY DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN (STUDI KASUS PROGRAM 1000 RUMPON DI KABUPATEN BULUKUMBA)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 April 2025 s/d 21 Juni 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM-1127761



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

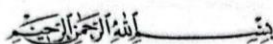
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221

Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588

Official Email : fisp@unismuh.ac.id

Official Web : <https://fisp.unismuh.ac.id>



Nomor : 0380/FSP/A.5-VIII/IV/1446 H/2025 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengantar Penelitian

Yth Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh

Makassar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Isra
Stambuk : 105641108521
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba
Judul Skripsi : *Tata Kelola Blue Economy dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Studi Kasus Program 1000 Rumpon di kabupaten Bulukumba)*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu. Khaeran Katziraa. ;

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

09 April 2025
Ketua Jurusan IP

Rudhyanil S.Sbs, M.Si
NBM. 984810



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunika
Public Administration - Government Studies - Communication Scienc



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 7911/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bulukumba
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6742/05/C.4-VIII/IV/1446/2025 tanggal 17 April 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ANDI MUH ISRA**
 Nomor Pokok : 105641108521
 Program Studi : Ilmu pemerintahan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Slt Afauddin No 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TATA KELOLA BLUE ECONOMY DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN (STUDI KASUS PROGRAM 1000 RUMPON DI KABUPATEN BULUKUMBA) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 21 April s/d 21 Juni 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 22 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

C. Dokumentasi Penelitian

Gambar lokasi penelitian dinas perikanan Kab.Bulukumba



Dokumentasi wawancara di kantor dinas perikanan Kab. Bulukumba

kepala Dinas Perikanan

kepala bagian Tangkap



Dokumentasi bersama nelayan penerima rumpon





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Andi Muh.Isra

Nim : 105641108521

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6%	10 %
2	Bab 2	13%	25 %
3	Bab 3	8%	1 %
4	Bab 4	4%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursyah M.I.I.P.
 NBM. 904501

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andi Muh Isra, selaku peneliti lahir di Bulukumba 15 Oktober 2001 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Andi Abd Kahar dan Andi Irma. Saat ini peneliti berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Rilau Ale, Kelurahan Palampang.

Peneliti menempuh pendidikan di SDN 82 Palampang, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMPN 39 Bulukumba kemudian meneruskan pendidikan di SMAN 10 Bulukumba. Kemudian pada tahun 2021 peneliti tercatat sebagai Mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan. Peneliti pada saat menjadi mahasiswa aktif di Himpunan Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) sebagai wakil Ketua periode 2023-2024, pernah sebagai kordinator kabupaten KKP Fisip XXIX tahun 2024 di Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2025 peneliti berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah, agar tercapainya suatu keberhasilan penelitian maka peneliti mengikuti arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing. Dengan ketekunan dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir karya ilmiah ini, semoga dengan penulisan karya ilmiah ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar- besarnya atas terselesaikannya tugas akhir yang berjudul “Tata Kelola Blue Economy Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelutan Studi Kasus Program 1000 Rumpon Di Kabupaten Bulukumba.”

